



**PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PADA  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBUKOTA KABUPATEN MADIUN  
DI KECAMATAN MEJAYAN**

**( Studi pada masyarakat kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun )**

*The Socioeconomic Change of The Community On The Development Of  
Infrastructure The Capital of Madiun District In Mejayan Sub-district*

*( Study in the sub-district of Mejayan, Madiun )*

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

**Ardy Prasetyo  
NIM 130910201019**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**



**PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PADA  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBUKOTA KABUPATEN MADIUN  
DI KECAMATAN MEJAYAN**

**( Studi pada masyarakat kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun )**

*The Socioeconomic Change of The Community On The Development Of  
Infrastructure The Capital of Madiun District In Mejayan Sub-district*

*( Study in the sub-district of Mejayan, Madiun )*

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

**Ardy Prasetyo  
NIM 130910201019**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**

## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

1. Ibunda Almh. Yati dan Ayahanda Darno yang tercinta;
2. Kakakku, Nanik Sudarwati, Arlik Sudaryanto, dan Andik Sudaryanto yang saya cintai;
3. Guru-guruku sejak masih taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
5. Kawan-kawanku se-angkatan 2013 Program Studi Administrasi Negara.

**MOTTO**

“Janganlah putus asa jika otak tumpul dan akal kurang cerdas. Karena kadang-kadang lebih maju seseorang yang tumpul otak tetapi tidak putus asa, daripada seseorang yang cerdas tetapi pemalas”<sup>1</sup>

(Prof. Dr. Hamka)



---

<sup>1</sup> Hamka, 1984. *Lembaga Hidup*. Jakarta: PT Pustaka Panjimas

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Ardy Prasetyo

NIM : 130910201029

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah berjudul “PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBUKOTA KABUPATEN MADIUN DI KECAMATAN MEJAYAN (Study pada masyarakat kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Desember 2017

Yang menyatakan,

Ardy Prasetyo  
NIM 130910201029

**SKRIPSI**

**PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PADA  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBUKOTA KABUPATEN MADIUN  
DI KECAMATAN MEJAYAN**

**( Study pada masyarakat kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun )**

*The Socioeconomic Change of The Community On The Development Of  
Infrastructure of The Capital of Madiun District In Mejayan Sub-district*

*( Study in the sub-district of Mejayan, Madiun )*

Oleh

Ardy Prasetyo  
NIM 130910201029

Pembimbing

Dosen Pembimbing 1 : Dr. Sutomo, Msi

Dosen Pembimbing 2 : Hermanto Rohman, S.Sos, MPA

## RINGKASAN

**Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan ( Studi pada masyarakat kecamatan Mejayan kabupaten Madiun );** Ardy Prasetyo, 1310201029; 2017: 119 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur ibukota kabupaten Madiun di kecamatan Mejayan. Dampak kebijakan merupakan bagian dari proses evaluasi yang fungsinya untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan ketika kebijakan tersebut menyentuh masyarakat, khususnya penerima manfaat, baik dampak positif maupun negatif. Kebijakan pemindahan ibukota Kabupaten Madiun ke kecamatan Mejayan merupakan salah satu langkah pemerintah Kabupaten Madiun untuk melaksanakan pembangunan daerah berdasarkan asas otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab. Pemindahan ibukota tersebut mempunyai tujuan di antara lain mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan ekonomi di Kabupaten Madiun. Dengan dipindahkannya ibukota ke kecamatan Mejayan maka pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sebagai pendukung pemerintahan terus dilakukan. Perubahan sosial ekonomi masyarakat terus berubah seiring dengan pesatnya pembangunan di wilayah kecamatan Mejayan sebagai ibukota Kabupaten Madiun.

Lokasi penelitian berada di kecamatan Mejayan kabupaten Madiun karena masyarakat Mejayan merupakan penerima dampak langsung dari pembangunan infrastruktur pemindahan ibukota Kabupaten Madiun. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi terstruktur atau tersamar, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yang terbagi ke dalam tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat, dan triangulasi sumber.

Hasil yang dapat digambarkan dari penelitian ini bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan dikecamatan Mejayan terhitung cepat karena kurang dari 10 tahun sudah berdiri bangunan yang diharapkan. Pemerintahan kabupaten Madiun juga sudah melaksanakan tugasnya di Mejayan, meskipun belum sepenuhnya tapi pembangunan ditargetkan selesai tahun 2018. Selanjutnya dengan selesainya pembangunan di wilayah Mejayan makan semua kantor pemerintahan berada di kecamatan Mejayan. Sebagai hasil dari pembangunan infrastruktur menimbulkan terjadinya perubahan sosial ekonomi masyarakat Mejayan. Adapun dampak ekonomi antara lain; 1. Kesempatan kerja, yang mencakup peluang usaha baru dan kemudahan dalam memperoleh pekerjaan, 2. Peningkatan pendapatan perkapita. Sedangkan dampak sosial diantaranya; 1. Pealihan fungsi lahan, 2. Kehidupan konsumenisme dan hedonisme, 4. Memudarnya interaksi sosial, dan 5. Keamanan.

## PRAKATA

Jauh Sebelum tulisan ini dilayangkan menjadi sebuah skripsi, penulis tengah tertarik pada kebijakan publik yang dikemas kedalam bentuk pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Karena, kemajuan suatu negara terletak pada kualitas kebijakan publik yang dibuat oleh negara tersebut. Hal ini yang menjadikan penulis lebih tertarik pada kebijakan Publik. Judul yang penulis ambil dalam penelitian ini, yaitu “Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kabupaten Madiun Di Kecamatan Mejayan (Study pada masyarakat kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun).

Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, pertolongan serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, penulis juga lantunkan kepada Rasulullah SAW. Karena berkat suri tauladan yang diajarkannya secara tepat, dapat mendorong penulis untuk berlaku menjadi lebih baik. Karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini disusun untuk mencurahkan kritik penulis terhadap berjalannya program ketika menyentuh masyarakat dan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada.

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi;
3. Dr. Sutomo, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
4. Drs. Agus Suharsono, M.Si, selaku Dosen pembimbing Akademik;
5. Dr. Sutomo, M.Si dan Hermanto Rohman, S.Sos, MPA, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatiannya

guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi;

6. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji, sehingga menyempurnakan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya selama penulis belajar di Jurusan Ilmu Administrasi, khususnya Administrasi Negara.
8. Brain Abqori A, Agung Budi P, Risna Agung, Aryo Teguh serta semua alumni nias 3 no 7 yang selalu menemani penulis, tempat berkeluh kesah dan sebagai penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Khoirul Fanani, Ahmadi Imam, Moch. Hasan Sabilli dan Muhammad Muajib Ardiyansah sebagai teman berdiskusi yang turut serta dalam kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Kawan Administrasi Negara 2013 yang selalu menemani penulis ketika senang maupun sedih;
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Halaman Persembahan.....	ii
Motto.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Ringkasan.....	vi
Prakata.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
2.1 Pemerintah Daerah.....	17
2.2 Pengembangan Wilayah.....	20
2.2.1 Konsep Pengembangan Wilayah.....	21
2.2.2 Jenis Perwilayahan.....	23
2.2.3 Kebijakan Pengembangan Wilayah.....	25
2.2.4 Teori Pengembangan Wilayah.....	26
2.3 Pembangunan Infrastruktur.....	30
2.3.1 Pembangunan.....	30
2.3.2 Infrastruktur.....	32
2.4 Perubahan Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur.....	34
2.4.1 Perubahan Sosial.....	35
2.4.2 Perubahan Ekonomi.....	37
2.4.3 Indikator Sosial Ekonomi.....	39
2.5 Penelitian Terdahulu.....	41
2.6 Kerangka Berfikir.....	43
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	44
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
3.3 Situasi Sosial.....	46
3.3.1 Tempat.....	46
3.3.2 Pelaku.....	46
3.4 Desain Penelitian atau Rancangan Penelitian.....	46

6.4.1	Fokus Penelitian.....	47
6.4.2	Penentuan Informan.....	47
6.4.3	Data dan Sumber Data.....	49
<b>3.5</b>	<b>Teknik dan Pengumpulan Data.....</b>	<b>49</b>
<b>3.6</b>	<b>Teknik Menguji Keabsahan Data. ....</b>	<b>50</b>
<b>3.7</b>	<b>Teknik Peenyajian dan Analisis Data .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
<b>4.1</b>	<b>Gambaran Umum Kabupaten Madiun.....</b>	<b>54</b>
4.1.1	Sejarah Kabupaten Madiun.....	54
4.1.2	Visi-Misi Kabupaten Madiun 2013-2018.....	55
4.1.3	Keadaan Geografis.....	56
4.1.4	Keadaan Penduduk.....	57
4.1.5	Keadaan Pemerintah.....	57
<b>4.2</b>	<b>Gambaran Umum Kecamatan Mejayan.....</b>	<b>58</b>
4.2.1	Keadaan Geografis.....	58
4.2.2	Keadaan Penduduk.....	58
4.2.3	Keadaan Fisik.....	59
<b>4.3</b>	<b>Sejarah Perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun.....</b>	<b>60</b>
<b>4.4</b>	<b>Gambaran Pemindahan Ibukota Kabupaten Kabupaten Madiun ke Kecamatan Mejayan.....</b>	<b>67</b>
<b>4.4.1</b>	<b>Latar Belakang dan tujuan.....</b>	<b>69</b>
<b>4.4.2</b>	<b>Pelaksanaan pemindahan ibukota Kabupaten Madiun.....</b>	<b>73</b>
<b>4.4.3</b>	<b>Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Mejayan..</b>	<b>81</b>
<b>4.5</b>	<b>Analisi Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Pembangunan infrastruktur Ibukota Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan.....</b>	<b>88</b>
<b>4.5.1</b>	<b>Perubahan Ekonomi Mayarakat Pada Pembangunan Infrastruktur.....</b>	<b>89</b>
<b>4.5.2</b>	<b>Perubahan Sosial Mayarakat Pada Pembangunan Infrastruktur.....</b>	<b>101</b>
<b>BAB V.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>113</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran.....</b>	<b>114</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>		<b>115</b>
<b>Lampiran.....</b>		<b>119</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1</b> Distribusi Luas Penggunaan Lahan Terbangun Wilayah Perkotaan di Kecamatan Mejayan.....	1
<b>Tabel 1.2</b> Jumlah infrastruktur terbangun wilayah kecamatan Mejayan.....	2
<b>Tabel 1.3</b> Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kecamatan Mejayan Tahun 2006-2015.....	5
<b>Tabel 1.4</b> Indikator Penentuan Lokasi Ibukota Kabupaten Madiun.....	7
<b>Tabel 1.5</b> Jumlah unit usaha industri formal dan non formal menurut kecamatan di Kabupaten Madiun tahun 2014.....	10
<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu.....	41
<b>Table 4.1</b> Jumlah Penduduk awal tahun 2016 menurut jenis kelamin dan Desa/ Kelurahan.....	59
<b>Tabel 4.2</b> Jarak antar ibukota kecamatan dengan Ibukota Kabupaten Madiun.....	72
<b>Tabel 4.3</b> Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.....	83
<b>Tabel 4.4</b> Pembangunan infrastruktur pemindahan ibukota di kecamatan Mejayan 2010-2017.....	85
<b>Tabel 4.5</b> Profil industri formal dan non formal menurut kecamatan di Kabupaten Madiun tahun 2014.....	89
<b>Tabel 4.6</b> Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut lapangan usaha di kecamatan Mejayan tahun 2016 dan 2011....	91
<b>Tabel 4.7</b> Jenis usaha perdagangan menurut desa tahun 2010 dan 2015..	93
<b>Tabel 4.8</b> Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan jumlah tenaga kerja tahun 2016.....	94

<b>Tabel 4.9</b> Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Madiun Atas harga dasar konstan menurut pengeluaran tahun 2010,2014 dan 2016.....	96
<b>Tabel 4.10</b> Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	98
<b>Tabel 4.11</b> Makro Pertumbuhan Kabupaten Madiun.....	100
<b>Tabel 4.12</b> Peruntukan lahan bagian wilayah perkotaan Mejayan.....	103
<b>Tabel 4.13</b> Proyeksi penduduk pertengahan tahun berdasarkan SP 2010 menurut jenis kelamin dan kelompok umur, 2016. ....	107
<b>Tabel 4.14</b> Jumlah tindak pidana di kecamatan Mejayan 2012-2015.....	111

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Siteplan Pembangunan Pusat Pemerintahan.....	3
Gambar 1.2 Kondisi jalan Kabupaten di kecamatan Mejayan.....	9
Gambar 2.1 Kronologi terjadinya are pelayanan heksagonal.....	27
Gambar 3.1. Letak kecamatan di Kabupaten Madiun.....	73

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur ibukota Kabupaten Madiun di Mejayan, dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun di kecamatan Mejayan mengakibatkan terjadinya pembangunan infrastruktur pendukung wilayah perkotaan. Diberbagai tempat yang melakukan pembangunan akan berdampak pada suatu perubahan sosial. Sama halnya dengan kecamatan Mejayan yang dulu di pusat kecamatannya masih banyak lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perekonomian masyarakat masih didominasi oleh para petani. Namun, setelah adanya pemindahan Ibukota Madiun ke kecamatan Mejayan banyak lahan yang digunakan sebagai perkantoran dan pemukiman warga. Tabel 1.1 Berikut menggambarkan tentang distribusi lahan terbangun di kecamatan Mejayan

Tabel 1.1 Distribusi luas penggunaan lahan terbangun wilayah perkotaan di kecamatan Mejayan

No	Kelurahan / Desa	Luas Lahan Terbangun		%
		Tahun 2006 ( Ha )	Tahun 2014 ( Ha )	
1	Kaligunting	78,4	99,95	4
2	Sidodadi	67,42	71,52	2
3	Kuncen	10,86	13,38	6
4	Krajan	37,69	43,39	8
5	Pandeyan	12,03	30,88	40
6	Mejayan	72,24	88,15	6
7	Bangunsari	55,62	83,46	21
8	Ngampel	56,17	74,41	10
Jumlah		390,43	505,04	7

*Sumber : Kecamatan Mejayan Dalam Angka Tahun 2006 dan Tahun 2014,diolah.*

Tabel tentang distribusi luas penggunaan lahan terbangun diketahui bahwa penambahan lahan terbangun pada tahun 2006-2014 mengalami perubahan seluas 114,61 Ha atau 7%. Pada tahun 2006 luas lahan terbangun sebesar 390,43 Ha dan untuk lahan tidak terbangun 1.200,63 Ha. Kemudian menjadi 505,04 Ha pada tahun 2014 dan lahan tidak terbangun 1086,02 Ha. Penggunaan lahan ini digunakan sebagai perkantoran, pusat pelayanan masyarakat, tempat rekreasi, dan pemukiman. Daerah yang mengalami perubahan besar meliputi kelurahan Pandean 40%, kelurahan Bangunsari 21%, desa Ngampel 10%, dan kelurahan Krajan 8%, keempat daerah ini merupakan pusat kegiatan di wilayah perkotaan Mejayan sehingga membutuhkan lahan untuk meningkatkan aktivitas kekotaan di wilayah perkotaan Mejayan.

Pembangunan infrastruktur tentunya akan membawa perubahan terhadap ketersediaan lahan untuk pertanian. Hal tersebut berarti merubah pola pemanfaatan lahan masyarakat. perubahan pola pemanfaatan lahan masyarakat tersebut mengakibatkan perubahan struktur perekonomian masyarakat, yang kemudian ikut merubah pola kehidupan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang bertujuan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat memerlukan adanya keterkaitan dengan pengembangan wilayah dan tata ruang wilayah. Pembangunan infrastruktur dalam hal ini memerlukan perhatian terhadap lingkungan sosial ekonomi.

Tabel 1.2 Jumlah Infrastruktur Terbangun diwilayah kecamatan Mejayan

No	Infrastruktur	Jumlah	
		2006	2014
1	Sekolah	38	42
2	Pasar	3	3
3	Kantor Pemerintahan	1	23
4.	Ruang Terbuka Hijau	-	3
5	Masjid Besar	1	2
6	Rumah Sakit Umum Daerah	1	1

Sumber : hasil observasi penulis.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa adanya pembangunan infrastruktur baru diwilayah kecamatan Mejayan. infrastruktur tersebut merupakan sarana pendukung Mejayan sebagai ibukota Kabupaten Madiun. Dapat dilihat bahwa kantor pemerintahan menunjukan angka yang paling tinggi diantara infrastruktur terbangun lainnya. Infrastruktur lain yang terbangun diwilayah kecamatan Mejayan seperti infrastruktur sekolah, dalam tabel disajikan jumlah infrastruktur sekolah dasar sampai dengan Sekolah Meengah Atas dikecamatan Mejayan. Dari data diatas dapat dilihat bahwa terdapat empat pembangunan gedung sekolah baru yaitu dua sekolah dasar swasta, 1 sekolah menengah pertama swasta dan SMKN 1 Mejayan yang berda diwilayah desa Kaliabu. Sedangkan infrastruktur pasar, yang merupakan pasar baru dan menjadi ikon Kabupaten Madiun nantinya adalah pasar besar Mejayan yang berada wilayah desa bangunsari. Pada infrastruktur lainnya yang menjadi ikon ibukota baru Mejayan yaitu dibangunnya Masjid besar di wilayah desa bangunsari dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sebelumnya kecamatan Mejayan tidak punya sekarang mempunyai tiga RTH yang menjadi tempat berkunjung masyarakat masing masing terletak didesa Pandean dan Mejayan.

Gambar 1.1 . Siteplan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di kecamatan Mejayan



Sumber ; Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Kabupaten Madiun, 2017.

Sebagian besar letak pembangunan infrastruktur berada didesa yang terletak di sepanjang jalan utama. Gambar diatas merupakan gambaran tentang pusat pemerintahan yang akan dibangun dikecamatan Mejiyan. Jika dilihat dari siteplan diatas dapat diketahui bahwasanya pusat pemerintahan akan dibangun dalam satu lokasi seperti pada pusat pemerintahan sebelumnya. Pusat pemerintahan tersebut terdiri dari kantor bupati, dinas, kantor-kantor dan segala penunjang pemerintahan Kabupaten Madiun. Sesuai dengan fisibility dan Grand Detail Design (GDD) menyebutkan bahwa seluruh SKPD di Kabupaten Madiun nantinya akan berkantor diwilayah kecamatan Mejiyan Berdasarkan laporan feasibility dan GDD yang disusun oleh tim percepatan pengembangan wilayah kota Mejiyan seluruh pembangunan akan selesai pada tahun 2018. Tidak hanya pembangunan infrastruktur baru, akan tetapi peremajaan infrastruktur yang sudah ada di kecamatan Mejiyan juga dilakukan.

Selain pengalihan fungsi lahan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seiring dengan berkembangnya wilayah kecamatan Mejiyan semakin banyak pemukiman baru dalam bentuk perumahan yang dibangun diwilayah Mejiyan. Pembangunan infrastruktur pemerintahan Kabupaten Madiun dan pemukiman penduduk tersebut tentunya membutuhkan lahan yang tidak sedikit mengingat seluruh bangunan yang akan dibangun tersebut menggunakan lahan yang sebelumnya merupakan lahan pertanian masyarakat. Tentunya hal tersebut membawa perubahan terhadap penggunaan lahan yang ada diwilayah kecamatan Mejiyan.

Pengembangan Perencanaan pada suatu wilayah memerlukan tanah sebagai tempat pembangunan. Agar dapat memanfaatkan tanah secara efisien, maka terlebih dahulu harus memahami tentang pembangunan dan perencanaan wilayah. Sebagaimana pendapat Jayadinata (1999) bahwa kontribusi yang paling penting dari perencanaan pengembangan wilayah atau ruang adalah adanya permasalahan sosial ekonomi dan lingkungan yang berhubungan dengan perubahan dalam kawasan perkotaan dan pedesaan yang mempengaruhi pemanfaatan lahan.

Perubahan fungsi kecamatan Mejayan sebagai ibukota Kabupaten Madiun mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk dengan meningkatnya kebutuhan yang semakin tinggi dari sebelumnya dan menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas dan perubahan pola kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Berikut merupakan tabel 1.3 yang merupakan gambaran tentang pertumbuhan jumlah penduduk di kecamatan Mejayan.

Tabel 1.3 Pertumbuhan jumlah penduduk kecamatan Mejayan tahun 2006-2015

Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah Total	Pertumbuhan Per Tahun	Persentase (%)
	Laki-Laki	Perempuan			
2006	21.019	21.966	42.250	754	-
2007	21.115	22.135	43.250	265	0,62
2008	25.370	25.444	50.814	7.564	17,49
2009	25.446	25.538	50.984	170	0,33
2010	25.656	25.725	51.381	397	0,77
2011	25.029	24.956	49.985	( 1.396 )	( 2,79 )
2012	25.053	24.973	50.026	41	0,08
2013	22.616	22.269	44.885	( 5. 141 )	( 11, 45 )
2014	22.932	22.537	45.469	584	( 1, 28 )
2015	23.051	22.710	45.761	292	0,64

*Sumber : Mejayan Dalam Angka 2016.*

Tabel di atas menggambarkan pertumbuhan penduduk kecamatan Mejayan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 penurunan jumlah penduduk yang sangat besar hingga mencapai ( 11,45 ). Pada tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi penambahan jumlah penduduk akan tetapi tidak terlalu banyak yaitu sebesar 0,64%. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan penambahan kepadatan penduduk seperti pada tahun 2014 kepadatan penduduk 823 jiwa/km<sup>2</sup> dan pada tahun 2015 829 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk meningkat pada beberapa kelurahan yang wilayahnya terkena dampak secara langsung yakni lahannya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk digunakan sebagai pembangunan gedung perkantoran dan fasilitas umum.

Tingginya jumlah pertumbuhan penduduk selalu memberikan andil dalam pengembangan wilayah. Setiap adanya pembangunan infrastruktur baru akan muncul fasilitas pelayanan pendukung bagi masyarakat. Seperti halnya di kecamatan Mejayan, lahan yang digunakan sebagai pembangunan infrastruktur pendukung wilayah perkotaan disekitarnya terbangun pula fasilitas pendukung seperti kompleks pertokoan, perumahan, warung, hingga jasa pelayanan seperti warnet dan sebagainya. Keberadaan infrastruktur dan sarana pendukung ini tentunya akan mempengaruhi terhadap tingginya pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah terbangunnya infrastruktur. Kelurahan-kelurahan yang cukup tinggi mengalami pertumbuhan penduduk yakni Kelurahan Bangunsari, Mejayan, Pandeyan, dan Krajan. .

Berkembangnya kecamatan Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten Madiun serta dengan adanya pembangunan Infrastruktur trurut serta meningkatkan iklim investasi. Meski bukan investor besar, keseriusan pemerintah Kabupaten dalam menata kawasan Mejayan Kota Baru sedikit banyak sudah menunjukkan hasilnya. Terlihat dari kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang kini tak pernah sepi pengunjung Seperti yang disampaikan Bupati Kabupaten Madiun Muhtarom bahwa Geliat positif di RTH itu merupakan multiplier effect dari penataan Mejayan selama ini. Setelah semuanya selesai tertata dengan baik, perputaran uang di sana tentu semakin besar (dikutip dari <http://radarMadiun.co.id/detail-berita-2825-tak-akan-lari-investor-dikejar> .html, 16 Maret 2016 ). Hal tersebut didukung pula dengan dengan banyaknya pembangunan perumahan, kantor-kantor dan sarana rekreasi seperti swalayan, rumah makan, tempat karaoke, dan lain sebagainya. Keberadaan investasi tersebut tentunya memberikan dampak yang positif terhadap ketenagakerjaan di kecamatan Mejayan. Karena semakin banyak usaha yang ada maka semakin banyak pula tenaga kerja yang diserap.

Pada tahun 2009 Bupati Madiun melalui surat Nomor 135.7/335/402.011/2009 tanggal 6 November 2009 mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Madiun untuk memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun ke kecamatan Mejayan. Usulan tersebut beralasan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun. Sebelumnya pusat pemerintahan Kabupaten Madiun masih berda wilayah Kota Madiun yang diatur dalam Undang-undang No 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan surat usulan tersebut DPRD Kabupaten Madiun menyetujui usulan tersebut dan mengeluarkan sudah keputusan (SK) DPRD Kabupaten Madiun Nomor 13 tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009. Kemudian SK DPRD tersebut diteruskan melalui surat Bupati Madiun Nomor 135.7/375/402.011/2009 tanggal 15 Desember 2009 kepada Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya Gubernur Jawa Timur melalui surat Gubernur Jawa Timur Nomor 135/844/011/2010 tanggal 18 Januari 2010 meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan secara resmi pemerintahan Kabupaten Madiun berpindah ke Kecamatan Mejayan pada tanggal 6 Juni tahun 2010 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Kota Madiun Ke Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Tabel 1.4 berikut merupakan tabel indikator pemilihan Ibukota Kabupaten Madiun.

Tabel 1.4 Indikator penentuan lokasi ibukota Kabupaten Madiun.

No	Kecamatan	Indikator						Total	Rangking
		De mo gra fis	geogr afis	sosia l	ekono mi	infrast ruktur	orbita s		
1	Kebonsari	41	29	33	25	64	6	198	X
2	Geger	43	28	41	25	68	8	213	VII
3	Dolopo	44	26	52	26	82	3	233	II
4	Dagangan	40	23	33	23	75	12	206	IX
5	Wungu	42	25	37	22	81	15	222	IV
6	Kare	38	22	25	19	71	4	179	XV
7	Gemarang	38	24	23	20	71	5	181	XIV
8	Saradan	39	26	26	27	90	2	220	V
9	Pilangkenceng	40	26	27	21	76	1	191	XII
10	Mejayan	44	30	60	30	101	13	278	I
11	Wonoasri	40	27	31	17	81	14	211	VIII
12	Balerejo	39	28	29	20	66	11	193	XI
13	Madiun	40	27	51	25	78	10	231	III
14	Sawahan	38	27	28	18	67	9	187	XIII
15	Jiwan	42	27	38	26	77	7	217	VI

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, 2010.

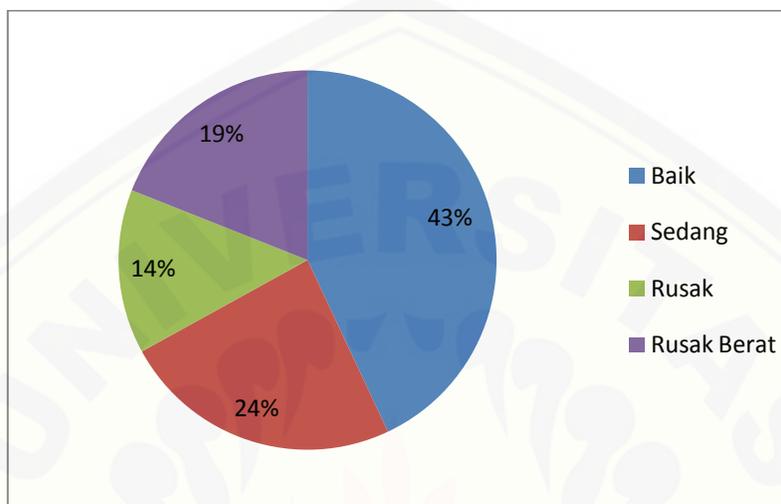
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun kecamatan Mejayan menjadi peringkat pertama dalam penilaian indikator kelayakan sebagai Ibukota Kabupaten. Metode yang digunakan dalam pemilihan Ibukota Kabupaten Madiun sendiri ada tiga yaitu analisis kebutuhan lahan, analisis sosial budaya mencakup kelayakan lokasi dan kelayakan aspek sosial budaya serta analisa teknis. Kecamatan Mejayaan memiliki jumlah penduduk 45.761 jiwa dengan komposisi 23.051 laki-laki dan 22.710 perempuan. Berada diwilayah Kabupaten Madiun yang berbatasan langsung dengan wilayah kecamatan sebelah Utara kecamatan Saradan dan Pilangkenceng, Sebelah Timur Kecamatan Saradan dan Gemarang, sebelah Selatan, Kecamatan Gemarang dan Kare, sedangkan sebelah Barat bertasan dengan wilayah kecamatan Wonoasri.

Potensi yang dimiliki kecamatan Mejayan adalah posisi geografis yang strategis, karena berada di jalur lalu lintas jalan yang menghubungkan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Mejayan terletak di antara pertemuan antara sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ngawi yang dihubungkan dengan Jalan Caruban – Ngawi yang merupakan jalan utama transportasi antar provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. dan sebelah utara berbatasan dengan Kota Madiun dihubungkan dengan jalan Madiun-Nganjuk yang merupakan jalan untuk menuju Kabupaten Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Dengan kondisi geografis yang sangat strategis membuat akses ke daerah lain tidak mengalami kendala. Kondisi geografis yang terletak sepanjang jalan provinsi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpergian baik dalam maupun luar Kabupaten. Selain itu sarana penunjang yang dalam hal transportasi seperti bus dan kereta api yang menuju ke Ibukota Provinsi bahkan Ibukota Negara mudah sekali ditemui, yaitu dengan adanya stasiun Caruban dan Terminal Caruban.

Dalam Bidang infrastruktur yang mendukung kecamatan Mejayan sebagai Ibukota adalah sebagian kantor telah berada di kecamatan Mejayan antar lain, DPRD Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya dan kantor perpustakaan. Selain itu fasilitas penunjang perkotaan seperti RSUD Panti Waluyo, stadion olahraga, terminal, pasar, stasiun KA dan tempat pembuangan akhir sampah telah berada di

kecamatan Mejayan. Selain infrastruktur berupa bangunan infrastruktur jalan di kecamatan Mejayan juga tergolong cukup baik. Seperti yang disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 1.2 Kondisi jalan Kabupaten di kecamatan Mejayan



Sumber ; Statistik kecamatan Mejayan 2016.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun panjang jalan kabupaten yang melintasi Kecamatan Mejayan sepanjang 28,3 km dimana 25,10 km sudah aspal, 3,20 km tidak diaspal dan sisanya masih tanah. Jika ditinjau dari kondisi jalannya maka 12,3 km dikategorikan kondisi baik; 6,80 km kondisi sedang; 3,90 km kondisi rusak; dan sisanya tergolong rusak berat. Hal tersebut tentunya yang memperkuat penilaian terhadap indikator pemilihan ibukota Madiun.

Potensi yang dimiliki oleh kecamatan Mejayan dalam hal lain yaitu dalam indikator ekonomi. Dalam hal ini kecamatan Mejayan yang terletak dijalur yang strategis masyarakatnya telah memanfaatkan untuk bisa memaksimalkan potensi tersebut seperti dengan banyaknya usaha yang berada di sepanjang jalan raya dan jenis industri yang yang ditekuni masyarakat Mejayan. Hal tersebut dapat tergambar dari tabel berikut.

Tabel 1. 5 Jumlah unit usaha industri formal dan non formal menurut kecamatan di Kabupaten Madiun tahun 2014

No	Kecamatan	Industri Formal	Industri nonformal
1	Kebonsari	51	1.028
2	Geger	63	1.063
3	Dolopo	70	1.670
4	Dagangan	51	1.172
5	Wungu	68	1.038
6	Kare	21	941
7	Gemarang	12	876
8	Saradan	27	1.147
9	Pilangkenceng	41	1.018
10	Mejayan	70	1.759
11	Wonoasri	50	980
12	Balerejo	45	1.026
13	Madiun	59	1.528
14	Sawahan	29	941
15	Jiwan	59	1.200

Sumber : Badan Pusat Statistik Madiun, 2017

Dari tabel diatas dapat Tabel diatas menggambarkan tentang jumlah unit industri yang ada di Kabupaten Madiun menurut kecamatan. Dapat dilihat bahwa kecamatan Mejayan dalam industri fomal jumlah unit yang dimiliki kecamatan dolopo dan kecamatan Mejayan memiliki jumlah yang sama yaitu keduanya menunjukkan angka terbesar dibandingkan kecamatan lain dengan jumlah 70 unit industri formal. Jika dibandingkan dengan jumlah unit industri nonformal jumlahnya jauh lebih tinggi dari kecamatan lain bahkan kecamatan Dolopo. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian dalam hal ini dibidang perindustrian diwilayah Mejayan lebih berkembang dari pada kecamatan lain diwilayah Kabupaten Madiun. Keadaan ekonomi diwilayah kecamatan Mejayan membawa pengaruh juga terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Sebagai contoh kondisi pendidikan masyarakat kecamatan Mejayan dimana 25% dari jumlah penduduknya sedang menempuh atau lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat, sedangkan 5,38% dari jumlah penduduk merupakan lulusan universitas dari D1/D2, Akademi/Sarjana Muda, Strata-S1, S2, dan S3(Madiun.go.id,diakses pada 12-12-2017,terlampir). Angka tersebut jika dibandingkan dengan kecamatan

lain di wilayah Kabupaten Madiun menempati angka tertinggi jika melihat dari segi sosial dalam hal pendidikan masyarakatnya. Tentu saja hal hal tersebut yang menjadi pertimbangan indikator penentuan ibukota Kabupaten Madiun hingga akhirnya terpilihlah kecamatan Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten Madiun.

Menurut Sarundajang (1997) berkaitan dengan pembangunan Indonesia Ibukota Kabupaten memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Pendorong ekonomi daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan regional.
2. Sebagai kota penyangga yang diharapkan akan mampu mengurangi arus migrasi langsung ke kota-kota besar, metropolitan, dan megapolitan.
3. Sebagai pusat pertumbuhan yang berfungsi untuk merangsang perkembangan daerah perdesaan.

Secara umum Ibukota merupakan bentuk pemukiman penduduk yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pelayanan sosial (Yunus, 2000). Fungsi utama Ibukota adalah memberikan pelayanan kepada wilayah belakangnya (*hinterland services*). Sebagai elemen sentra dan bagian dari strategi pengembangan wilayah, maka penentuan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun hendaknya dilandasi dengan pemahaman yang baik terhadap kondisi wilayah Kabupaten Madiun. Mengingat Fungsi utama Ibukota Kabupaten adalah memberikan pelayanan bagi wilayah belakangnya, seharusnya wilayah Kecamatan yang dipilih menjadi Ibukota Kabupaten Madiun merupakan wilayah yang memiliki infrastruktur dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik dibandingkan wilayah lainya.

Sebelum disahkannya Mejayan sebagai ibukota Kabupaten Madiun yang baru melalui PP No 52 Tahun 2010. Sebagai pertimbangan Pemerintah Kabupaten Madiun membentuk Tim Percepatan Pengembangan Kota Caruban berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/563/KPTS/402.031/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/375/KPTS/402.031/2009 tentang Tim Percepatan Pengembangan Kota Caruban ( Feasibility Study Kabupaten Madiun, 2010 ). Tim tersebut dibentuk dengan maksud segera terbentuknya dasar yang jelas sehingga kebijakan

pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun itu segera terwujud. Tim percepatan tersebut beranggotakan dari pejabat eselon dua yang terdiri dari berbagai macam jabatan dari Bappeda, Dinas DPPKA, Dinas PU dan cipta Karya, Inspektorat, DPPKA, dan kantor Lingkungan Hidup.

Dengan diberlakukannya PP No 52 Tahun 2010 maka tim percepatan pengembangan kota caruban memiliki tugas yaitu menyusun uji kelayakan (*Feasibility Study*) dan *Grand Desain Detail* (GDD). Adapun tujuan dari dibentuknya feasibility dan GDD tersebut tujuannya adalah untuk memberikan landasan kebijakan bagi pemerintahan kabupaten Madiun yang meliputi :

1. Perencanaan Pembangunan sarana dan prasarana Kantor Pemerintah.
2. Pengembangan Kantor Pemerintah Lama dengan berbagai alternatif pembangunan baik itu secara intensifikasi dan ekstensifikasi.
3. Perencanaan penyedia akses guna mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Kabupaten.
4. Mendorong peran serta masyarakat dalam optimalisasi fungsi Kantor Pemerintah.

Berdasarkan feasibility study dan GDD tersebut dilaporkan bahwasanya pembangunan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Madiun di kecamatan Mejayan ditargetkan selesai pada tahun 2018. Laporan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik lagi untuk selanjutnya bisa digunakan untuk pedoman dalam Perencanaan Pembangunan Kawasan Kantor Pemerintah Kabupaten Madiun di kecamatan Mejayan. Dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, maka Pemerintah Kabupaten Madiun merencanakan membuat kawasan pemerintahan yang terpusat, sehingga akan terbentuk satu sentral di Kabupaten Madiun, yaitu Kantor Pemerintah (*Government Center*). Sebagai Kantor Pemerintah, Kantor Pemerintah yang dulu tidak memenuhi fungsi dari pengembangan sarana prasarananya yang diakibatkan beberapa hal berikut :

1. Pendopo sebagai tempat Kepala Daerah, masih berada di wilayah Kota Madiun, begitu juga beberapa SKPD yang belum berada di Kabupaten Madiun.

2. Kualitas bangunan yang perlu ditingkatkan.
3. Beberapa SKPD yang system kerjanya bersangkutan letaknya masih terpisah-pisah sehingga kinerjanya masih belum maksimal.
4. Posisi Kantor Pemerintah Kabupaten Madiun yang tidak berada di ibukota kabupaten.

Selain itu secara khusus sasaran penyusunan Feasibility Study Pembangunan Kantor Pemerintah Kabupaten Madiun adalah :

1. Terwujudnya sarana pemerintahan dengan sistem pelayanan terpadu yang memiliki seperti :
  - a. Bernilai efisien dan optimal
  - b. Dapat menunjang sistem pelayanan pemerintahan bagi masyarakat perdesaan, perkotaan, dan pendatang.
  - c. Memiliki lokasi yang strategis dan terpusat.
2. Terwujudnya desain Kantor Pemerintah yang baik guna menunjang optimalisasi fungsi dan efisiensi penyediaan prasarana Kantor Pemerintah.
3. Tercapainya sistem pemerintahan yang baik.
4. Terlaksananya pembangunan Kantor Pemerintah yang sesuai dengan tata lingkungan dan dinamika tata ruang wilayah.

Berdasarkan tujuan penyusunan feasibility dan GDD diatas dapat diketahui bahwa pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun bertujuan untuk membangun pusat pemerintahan diwilayah Kabupaten Madiun yang sebelumnya, pusat pemerintahan Kabupaten Madiun berada di Kota Madiun. Sebelum kecamatan Mejayan sebagai ibukota Kabupaten Madiun secara resmi Pemerintahan Kabupaten Madiun berada di Kota Madiun berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur. Sehingga semua pelayanan pemerintah berada di Kota Madiun mulai dari Pusat Pemerintahan hingga ruang publik seperti alun – alun dan masjid agung. Namun dalam perkembangannya Kota Madiun yang semula merupakan wilayah yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Madiun sekaligus menjadi tempat kedudukan atau pusat Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun telah menjadi daerah Kota

Besar yang Otonom dan terpisah dari Kabupaten Madiun berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut maka Kota Madiun menjadi dua pusat pelayanan pemerintahan yaitu Kabupaten dan Kota Madiun. Semua fasilitas dan layanan publik Kabupaten Madiun berada di wilayah Kota Madiun. Hal tersebut dikarenakan Pemerintahan Kabupaten tidak memiliki Ibukota Kabupaten sendiri.

Seiring dengan berjalannya waktu suatu daerah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga membutuhkan pengembangan kota yang sesuai dengan tuntutan perubahan jaman. Dengan adanya pengembangan tersebut, maka dipecahkan suatu daerah ke dalam bentuk kota dan kabupaten. Dengan pembentukan kota dan kabupaten, seharusnya pusat pemerintahan dari kota dan kabupaten tersebut harus terpisah supaya pengaturan daerah dapat lebih terencana dan teratur serta tidak terjadi dualisme pemerintahan. Pembentukan pusat kota atau kabupaten merupakan hal yang penting bagi berjalannya suatu pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang terbentuk.

Pembangunan daerah merupakan salah satu rangkaian dasar keberhasilan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari kebijakan otonomi sebagaimana tuntutan pada saat reformasi digulirkan. Tujuan tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien akan mewujudkan tercapainya kemandirian daerah diarahkan juga untuk pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam rangka pengembangan sistem otonomi daerah telah muncul undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana dari fenomena di atas, Kecamatan Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten Madiun menjadi pusat perkembangan sekaligus pusat pelayanan sehingga mengakibatkan terjadinya pembangunan infrastruktur di kecamatan Mejayan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur sebagai pendukung wilayah perkotaan Ibukota Kabupaten tentunya memberikan perubahan terhadap sosial ekonomi masyarakat Mejayan. Maka penulis mencoba menggambarkan dan menganalisis lebih dalam tentang perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur ibukota Kabupaten Madiun di kecamatan Mejayan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut Sugiyono (2008:29), masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya terjadi dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksana. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosila yang akan di teliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2008:209). Berdasarkan pengertian mengenai rumusan masalah dan tarar belakang penelitian maka penulis merumuskan masalah Bagaimana perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur ibukota Kabupaten Madiun di kecamatan Mejayan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan hasil yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2008:305). Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis lebih dalam tentang perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur ibukota Kabupaten Madiun di kecamatan Mejayan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Menurut Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember ( 016:49) menjelaskan bahwa manfaat penelitian disebut juga dengan signifikansi penulisan, manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik

untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur .
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dibangku kuliah dalam kehidupan yang sesungguhnya, serta sebagai salah satu syarat untuk lulus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Jember.
2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan dan wawasan pada perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan mengenai perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Waryadiyanta (2006:9) mengemukakan bahwa dalam sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau antara abstraksi dengan realitas. Tinjauan pustaka berperan untuk menjelaskan posisi penelitian dalam peta penelitian. Pembangunan teori, konsep, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual dalam tinjauan pustaka akan membuat penelitian dapat dilakukan secara sistematis yang terbangun dari teori-teori terkait dengan masalah yang dibahas dan terlepas dari pengulangan pembahasan dari sebuah permasalahan.

Buku edoman penelitian karya ilmiah Universitas Jember (2016:49) menyebutkan bahwa tinjauan pustaka meliputi kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu (karya empiris) berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian sebelumnya yang dikaitkan dengan masalah yang dihadapi, perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori.

#### 2.1 Pemerintahan Daerah

Dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan

bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.”

Otonomi berasal dari kata Yunani *autos* dan *nomos*. Kata pertama berarti “sendiri”, dan kata kedua berarti “perintah”. Otonomi bermakna “memerintah sendiri”. Dalam wacana administrasi publik daerah otonomi sering disebut sebagai *local self government*. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberikan gambaran dalam pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata, bertanggungjawab, dimana di dalamnya disebutkan bahwa urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan pengaturannya kepada pemerintahan daerah. Pemerintah Pusat melakukan identifikasi, pembahasan, dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada pemerintah daerah, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua 24 bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini ditetapkan antara lain untuk menyesuaikan perkembangan keadaan, kondisi ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah disebabkan dinamika pemerintahan daerah. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Pemda menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.” Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemda menyatakan bahwa: “DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.” Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah.

DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 149 DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota, anggaran dan pengawasan, sedangkan

kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

## 2.2 Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah dapat diartikan sebagai suatu usaha dasar yang dilakukan untuk merubah (baik dalam kualitas, jumlah dan jenisnya) dalam arti peningkatan daya guna sumber daya yang terbatas untuk kesejahteraan masyarakat yang ada pada suatu wilayah (Karmansyah, 1986:3-5). Namun demikian biasanya penggunaan istilah pengembangan wilayah adalah mengacu pada kemajuan fisik yang diharapkan mendorong kemajuan sosial tersebut. Kota dan desa adalah bagian objek dari pengembangan kota dan desa dalam suatu wilayah tertentu. Pengembangan wilayah secara denitif belum bisa diberikan batasan yang baku dan cenderung samar dengan pengertian lainnya seperti pembangunan wilayah, pembangunan daerah, perencanaan tata guna tanah, regional development.

Pada pengembangan wilayah ini, maka yang menjadi tujuan utamanya adalah melaksanakan pembangunan yang meliputi 3 kegiatan yang saling berhubungan sebagai berikut:

- a. Menimbulkan peningkatan kemakmuran dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan sebagai tujuan dengan tekanan perhatian pada lapisan terbesar (dengan pendekatan terkecil) dalam masyarakat.
- b. Memilih metode yang sesuai untuk mencapai tujuan.
- c. Menyusun kembali masyarakat dengan maksud supaya menimbulkan pertumbuhan sosial ekonomi yang kuat .(Jayadinata, 1999:283)

Terdapat tiga macam wilayah pengembangan, yaitu :

- a. Menurut prinsip homogenitas atau unformitas, yaitu geografisik atau sosial, wilayah ekonomi, atau wilayah budaya. Akan baik sekali jika macam wilayah yang terpilih berhimpit dengan daerah administrasi.
- b. Menurut konsep hubungan ruang, yaitu wilayah fungsional yang disebut juga wilayah terpusat.
- c. Menurut wilayah yang khusus yaitu wilayah terbelakang, wilayah aliran sungai, wilayah pedesaan, dan sebagainya, yang dikembangkan menurut prinsip unformitas. (Dusseldorp dalam Jayadinata, 1999 : 289)

Menurut Jayadinata (1999:4), pembangunan adalah mengadakan atau membuat sesuatu yang belum ada. Sedangkan pengembangan adalah meningkatkan atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada, keduanya bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya pengembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komperhensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Pada dasarnya pendekatan pengembangan wilayah ini digunakan untuk lebih mengefisienkan pembangunan dan konsepsi ini terus berkembang disesuaikan dengan tuntutan waktu, teknologi dan kondisi wilayahnya. Dari penjelasan diatas maka dapat diambil pengertian pengembangan wilayah adalah suatu usaha terencana untuk memajukan atau meningkatkan suatu wilayah dengan menggunakan potensi yang dimiliki daerah tersebut baik potensi sumber-sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

## 2.2.1 Konsep Pengembangan Wilayah

Menurut Jayadinata (1999:4), konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan peranan dalam menata kehidupan sosial ekonomi budaya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh globalisasi, pasar bebas dan ekonomi antar negara, antar daerah (kota atau

kabupaten) kecamatan hingga pedesaan. Menurut Adisasmita (2011:76-77), terdapat 3 jenis klasifikasi tentang wilayah yaitu :

1) Wilayah Homogin

Wilayah homogin dapat diamati dari 3 aspek, yaitu aspek ekonomi adalah mengenai tingkat pendapatan perkapita, sistem pertanian, tersediannya infrastruktur pembangunan, sarana transportasi, dan lainnya. Dari aspek ekonomi sosial, yaitu mengenai sistem gotong royong masyarakat, interaksi sosial, tingkat partisipasi masyarakat. Dari aspek budaya, yaitu mengenai keberagaman adat istiadat daerah, bahasa daerah, karakter penduduk dan lainnya. Dalam studi atau penelitian wilayah yang dilakukan, wilayah wilayah yang mempunyai kondisi karakteristik yang serupa ( misalnya wilayah yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tinggi) dikelompokkan secara tersendiri, apabila ditampilkan dalam gambar atau peta akan diberi warna atau notasi tertentu membedakan dengan wilayah lainnya (misalnya wilayah yang berpendapatan perkapitanya rendah).

2) Wilayah Polarisasi atau Wilayah Nodal

Wilayah nodal merupakan wilayah yang memiliki pusat (yang berfungsi sebagai ibukota, pusat kegiatan, pusat pembangunan atau pertumbuhan maupun pusat pelayanan). Masing-masing pusat mempunyai interaksi atau pengaruh terhadap wilayah disekitarnya atau terdapat kota-kota yang lebih kecil yang terletak di sekitarnya. Terminologi dari wilayah nodal adalah wilayah polarisasi. Polarisasi berasal dari kata pole (bahasa inggris) yang artinya kutub atau mengutub. Wilayah polarisai diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki pusatnya dan terdapat aras kegiatan dari wilayah atau wilayah sekitar menuju ke pusat.

3) Wilayah Program

Wilayah program atau perencanaan adalah wilayah yang dipilih (ditetapkan) sebagai lokasi dimana suatu rencana pembangunan akan dilaksanakan. Wilayah ini menekankan pada suatu program pembangunan, yang mempunyai sasaran pembangunan yang tertentu. Misalnya wilayah andalan adalah wilayah yang dipilih

untuk melaksanakan program pengembangan komoditas adalah yang berada di daerah pertanian.

Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses interaktif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya, yang bersifat dinamis. Dengan kata lain, menurut Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Penata Ruang, konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang senantiasa berkembang, yang telah diuji terapkan dan kemudian dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pengembangan wilayah di Indonesia.

Berpijak pada pengertian di atas maka pembangunan seyogyanya tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komperhensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antar berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumber daya alam, buatan, manusia, dan sistem aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya.

#### 2.2.2. Jenis-jenis perwilayahan

Menetapkan suatu perwilayahan dapat menggunakan beberapa cara, jika dilihat dari atas adalah membagi suatu wilayah yang luas. Misalnya wilayah suatu negara kedalam beberapa wilayah yang lebih kecil dalam satu keasatuan. Suatu perwilayahan dapat diklarifikasikan berdasarkan tujuan pembentukan wilayah itu sendiri. Menurut Soekarwati (1990:56), dasar dari perwilayahan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintah, di Indonesia dikenal wilayah kekuasaan pemerintah, seperti provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan , kelurahan, dan desa. Perwilayahan berdasarkan administrasi pemerintahan biasanya terikat kepada sejarah masa lalu dan telah ditetapkan berdasarkan

undang-undang, sehingga tidak mudah diubah. Pembentukannya biasanya berdasarkan sejarah, tuntutan masyarakat ataupun keputusan pemerintah. Jenis wilayah ini kurang efisien tetapi tidak mudah diganti bahkan dikembangkan.

- b. Berdasarkan kesamaan kondisi (homogeneity) , yang paling umum adalah kondisi fisik. Berdasarkan kesamaan kondisi fisik, misalnya kawasan pesisir, kawasan pegunungan. Kemudian berdasarkan kesamaan sosial budaya, misalnya daerah-daerah yang dibagi menurut suku mayoritas , tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, agama ataupun adat istiadat. Perwilayah berdasarkan homogenitas berguna untuk perencanaan sektoral, misalnya daerah-daerah yang memiliki kesamaan dalam saktor yang dibahas , misalnya pertanian rakyat, perikanan, perkebunan atau beberapa sektor sekaligus dapat dijadikan satu wilayah. Dengan demikian, dapat dibuat satu pusat pelayanan yang menangani masalah yang sama dan program penanganannya pun sama sehingga dapat memberikan jalan keluar yang tepat dan lebih efisien.
- c. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. Perlu ditetapkan terlebih dahulu beberapa pusat pertumbuhan yang kira-kira sama besarnya, kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan. Jenis perwilayahan ini mengenal adanya pusat-pusat pertumbuhan yang masing-masing memiliki daerah belakangnya. Perubahan atau perkembangan dipusat pertumbuhan akan mempengaruhi daerah sekitarnya atau belakangnya. Perwilayahan ini lebih tepat untuk perencanaan wilayah ekonomi daerah karena menyangkut seluruh aspek pengembangan wilayah, mengandung aspek keterkaitan yaitu memperhatikan hubungan satu unit terhadap unit daerah lainnya dalam pengembangan wilayah.
- d. Berdasarkan wilayah perencanaan atau program. Dalam hal ini ditetapkan batas-batas wilayah ataupun daerah yang terkena suatu program atau proyek dimana wilayah tersebut termasuk ke dalam suatu perencanaan untuk tujuan khusus. Jenis Wilayah ini sering bersifat insidental dan sementara karena dibuat untuk program khusus, misalnya untuk menanggulangi banjir di salah satu atau

beberapa alur sungai. Oleh karena itu akan selesai kalau program itu sendiri sudah selesai atau tidak ada tindak lanjut.

Berdasarkan definisi dasar perwilayahan, penelitian ini masuk dalam jenis perwilayahan berdasarkan ruang lingkup ekonomi. Dalam suatu daerah dapat terlihat perkembangannya melalui perkembangan ekonominya. Jenis perwilayahan ini lebih tepat untuk melihat pengembangan wilayahnya.

### 2.2.3 Kebijakan Pengembangan Wilayah

Seiring perkembangan zaman yang begitu pesat maka berbagai masalah perkotaan akan muncul, seperti penduduk yang semakin meningkat, kemacetan, meningkatnya kriminalitas, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Untuk memecahkan masalah tersebut terdapat kriteria-kriteria dasar yang dilandasi oleh kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten menurut Jayadinata (1999: 198) yang meliputi :

- 1) Mengupayakan pengembangan kabupaten yang serasi secara fisik artinya keserasian antara pengembangan wilayah terbangun dari wilayah terbuka sebagai penyangga.
- 2) Mengupayakan pengembangan kabupaten yang berdasarkan keseimbangan dan keserasian kehidupan kabupaten, mengingat beragamnya pola sosial budaya, sosial ekonomi, serta lingkungan fisik kabupaten. Termasuk di dalamnya terdapat upaya untuk dapat menyeraskan dan menyeimbangkan pengembangan berbagai sektor yang dualistik, modern dan tradisional, sektor formal dan informal.
- 3) Mengupayakan pengembangan wilayah baru untuk kabupaten yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan masyarakat termasuk upaya menghindari terjadi kelompok-kelompok eksklusif yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi di kalangan masyarakat dan penghematan sumber daya lahan untuk pembangunan.
- 4) Mengupayakan agar tidak terjadi perkembangan permukiman wilayah kabupaten yang terlalu tersebar sehingga dapat menimbulkan kekurangan efisiensi dalam

pengadaan sarana prasarana. Hal ini ditunjukkan untuk upaya pengembangan kabupaten.

- 5) Menunjang pengembangan pemukiman wilayah seperti pemukiman transmigrasi sebagai embrio pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah baru akan sangat penting dalam rangka membina pemerataan pembangunan daerah, pemanfaatan sumber daya alam secara terarah dan kepada keamanan dan pertahanan.

Kebijakan pengembangan wilayah tersebut sangat penting dalam pengembangan wilayah agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sesuai dengan pendapat Jayadinata (1999:276) tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wilayah, yaitu :

1. Perencanaan harus disertai kekuasaan efektif untuk pelaksanaannya. Adanya keleluasaan yang efektif dalam perencanaan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengembangan wilayah.
2. Bagi suatu kebijakan harus memiliki ikatan politis yang tetap.
3. Untuk pengembangan wilayah harus dibuat peraturan (sarana) untuk menunjang pelaksanaannya dan agar pengembangan wilayah berjalan dengan baik.
4. Dalam pengembangan antar wilayah harus dipertahankan adanya keseimbangan nasional. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah satu dengan yang daerah lainnya, akibatnya adanya pengembangan wilayah yang tidak merata.

Pada kebijakan pengembangan wilayah tersebut yang harus diperhatikan pada perencanaannya. Selain itu dalam pengembangan antar wilayah juga harus mempertahankan keseimbangan nasional. Dengan begitu pengembangan wilayah dapat terwujud dengan baik.

#### 2.2.4 Teori-teori Pengembangan Wilayah

Teori-teori yang muncul pada generasi pertama ini berbasiskan pertumbuhan ekonomi, sentralistik atau bersifat top down. Diantaranya yang terkenal adalah central

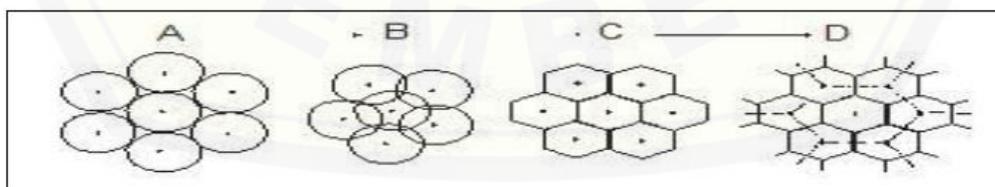
place, teori ekonomi neoklasik/integrasi, teori kutub pertumbuhan (growth pole theory), dan teori export-base. Teori-teori dalam generasi ini menekankan pentingnya peran pemerintahan, terutama pemerintah pusat, untuk menjadi aktor yang sangat penting dan menentukan corak pembangunan wilayah (Adell dalam Dhoni 2012:76).

#### 1. Teori tempat pusat/sentral (Central Place Theory)

Teori tempat pusat/sentral (Central Place Theory) dikemukakan oleh Christaller, bahwa pusat pelayanan (Central Place) merupakan tempat pusat yang melayani penduduk dari daerahnya sendiri dan daerah belakangnya (Rondenelli, 1985:5). Terdapat 3 (tiga) unsur penting yang dapat mendukung terselenggaranya kegiatan di pusat-pusat pelayanan (Glasson, 1977:134-135) yaitu: Hirarki, Penduduk Ambang (threshold population) dan ruang lingkup Pasar sebagai fungsi pelayanan. Ada lima asumsi yang merupakan faktor mempengaruhi terbentuknya tempat pusat menurut Christaller dalam Daldjoeni (1992 :108) yaitu: (1) Jarak ke tempat pusat yang dinyatakan biaya dan waktu, (2) jangkauan (range) suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu, (3) semua konsumen dalam usaha mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan, menuju ketempat pusat yang paling dekat letaknya, (4) kota-kota berfungsi sebagai tempat pusat bagi wilayah disekitarnya, (5) wilayah tersebut digagaskan sebagai dataran dimana penduduknya tersebar merata dan ciri-ciri ekonomisnya sama .

Penjelasan model Christaller tentang terjadinya model area pelayanan heksagonal adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kronologi terjadinya area pelayanan heksagonal



- 1) Mula-mula terbentuk area pelayanan berupa lingkaran-lingkaran. Setiap lingkaran memiliki pusat dan menggambarkan threshold. Lingkaran-lingkaran ini tidak tumpang tindih seperti pada gambar A
- 2) Kemudian digambarkan lingkaran-lingkaran berupa range dari pelayanan tersebut yang lingkarannya boleh tumpang tindih seperti tergambar pada gambar B
- 3) Range yang tumpang tindih dibagi antara kedua pusat yang berdekatan sehingga terbentuk areal yang heksagonal yang menutupi seluruh dataran yang tidak lagi tumpang tindih tergambar dalam C
- 4) Tiap pelayanan berdasarkan tingkat ordenya memiliki heksagonal sendiri-sendiri. Dengan menggunakan  $k=3$ , pelayanan orde I lebar heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal pelayanan orde II. Pelayanan orde II lebar heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal pelayanan orde III, dan seterusnya. Tiap heksagonal memiliki pusat yang besar kecilnya sesuai dengan besarnya heksagonal tersebut. Heksagonal yang sama besarnya tidak saling tumpang tindih, tetapi antara heksagonal yang tidak sama besarnya akan terjadi tumpang tindih dalam gambar D (Rondenelli, 1985:5).

Teori central place adalah teori pembangunan wilayah dimana lokasi pusat layanan merupakan fungsi dari kapasitas yang dibutuhkan wilayah tersebut dan sekitarnya, serta biaya transportasi penggunaannya. Pembangunan wilayah di sini diarahkan kepada perencanaan lokasi yang cocok untuk fungsi tersebut.

## 2. Teori pusat pertumbuhan ( growth pole theory)

Pusat pertumbuhan ( Growth Pole) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (daerah belakangnya). Secara geografis pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga pusat daya tarik (pole of attraction) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang datang

memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut. Tidak semua kota generatif dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan. Menurut Tarigan ( 2004 :128) pusat pertumbuhan harus memiliki nilai ekonomi, adanya multiplier effect (unsur pengganda), adanya konsentrasi geografis , dan bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya, seperti penjelasan berikut ini :

1) Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan

Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya, sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh, akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya, karena saling terkait. Kehidupan kota menjadi satu irama dengan berbagai komponen kehidupan kota dan menciptakan sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan.

2) Ada efek pengganda ( Multiplier Effect)

Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Apabila ada satu sektor atas permintaan dari luar wilayah, produksinya meningkat, karena ada keterkaitan mengakibatkan produksi sektor lain juga meningkat dan akan terjadi beberapa kali lipat dibandingkan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut. Unsur efek pengganda sangat berperan dalam membuat kota itu mampu memacu pertumbuhan daerah belakangnya, karena faktor bahan baku/tenaga kerja yang dipasok dari daerah belakangnya akan meningkat tajam.

3) Ada konsentrasi geografis

Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi diantara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik (attractiveness) dari kota tersebut. Orang yang datang ke kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Jadi kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat waktu, tenaga dan biaya. Hal ini membuat kota itu menarik untuk dikunjungi dan karena volume transaksi yang makin meningkat akan menciptakan economic of scale sehingga tercipta efisiensi lanjutan.

#### 4) Bersifat mendorong ke daerah belakangnya

Hal ini berarti antara kota dan daerah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri. Apabila terdapat hubungan yang harmonis dengan daerah belakangnya dan kota itu memiliki tiga karakteristik yang disebutkan terdahulu, otomatis kota itu akan berfungsi untuk mendorong daerah belakangnya.

Teori pusat pertumbuhan (growth pole theory) memandang lokasi industri sebagai fungsi dari cabang penting industri tersebut. Wilayah semacam inilah yang mampu mengembangkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Konsep yang dikemukakan adalah pengembangan industri di wilayah tertinggal. Intervensi diarahkan kepada lokasi industri untuk menciptakan hubungan antar wilayah yang memiliki perbedaan reit pertumbuhan .

## 2.3 Pembangunan Infrastruktur

### 2.3.1 Pembangunan

Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri (2006:15) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan admnistrasi yang baik.

Adapun menurut (Supardi, 1994) pembangunan adalah suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur. Dalam pelaksanaannya, proses pembangunan itu berlangsung melalui suatu siklus produksi untuk mencapai suatu konsumsi dan pemanfaatan segala macam sumber daya dan Utara modal, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber keuangan, permodalan dan peralatan yang terus menerus diperlukan dan perlu ditingkatkan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dapat timbul efek samping berupa

produk-produk bekas dan lainnya yang bersifat merusak atau mencemarkan lingkungan sehingga secara langsung atau tidak langsung membahayakan tercapainya tujuan pokok pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Peningkatan pembangunan, pemeliharaan kestabilan ekonomi, sosial dan ekologi harus berjalan serasi dan bersama-sama. Artinya bahwa pembangunan hendaknya bersifat terpadu antara segi ekonomi, sosial dan ekologi dengan tujuan menggunakan ekologi dalam perencanaan pembangunan yang meliputi peningkatan mutu pencapaian pembangunan dan meramalkan sebelumnya pengaruh aktivitas pembangunan pada sumber daya dan proses-proses alam lingkungan yang lebih luas. Adapun pembangunan menurut (Tjahja, 2000) adalah perubahan yang terencana dari situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih baik. Terkait dengan hal itu konsep pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan pendekatan kemanusiaan merupakan suatu konsep yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena secara kodrati masyarakat mempunyai kecenderungan untuk merubah hidup dan kehidupan sesuai dengan perkembangan jaman. Oleh karena itu pendekatan masyarakat dititik beratkan pada lingkungan social ekonomi yang bercirikan:

1. Pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Pembangunan yang ditujukan pada pembangunan sosial seperti terwujudnya pemerataan pendapatan dan mewujudkan keadilan.
3. Pembangunan yang di orientasikan kepada masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Sedangkan menurut sondang P.Siagian (2008) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas

dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik.

Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (kuncoro 2010:20) pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat.

Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2001 :47) pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai dengan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat.

### 2.3.2 Infrastruktur

Infrastruktur merupakan prasarana publik paling primer dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur adalah merupakan Public Service Obligation, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah. Keberadaan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan, sehingga pada tahap awal pembangunan disuatu negara hal tersebut akan dipikul sepenuhnya oleh Pemerintah.

Menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai

suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon. di infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk:

1. Digunakan bersama-sama (shared) oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
2. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
3. Lebih dipandang sebagai sebuah service (considered a service), termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan (device) fisik.
4. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.
5. Terpisah (distinct) dari struktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya dan orang-orang.

J'afar M. (2007) menyatakan bahwa, infrastruktur memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dan jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait. Infrastruktur sepertinya menjadi jawaban dari kebutuhan negara- negara yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta merendahkan biaya aktifitas investor dalam dan luar.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur adalah pembangunan fasilitas-fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah pusat

maupun daerah sebagai pelayan public untuk menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi maupun sosial suatu masyarakat. Ada tiga alasan pokok yang dapat dikemukakan tentang pentingnya pembangunan infrastruktur.

1. Pembangunan infrastruktur mampu menyediakan lapangan pekerja. Hal ini merupakan salah satu nilai penting dan langkah ke arah terciptanya rakyat dan negara adil dan makmur.
2. Pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, dan infrastruktur sains secara langsung akan mempengaruhi iklim investasi. Pertumbuhan kapital dan aliran investasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung baik pada zona kapet, kawasan industri, pelabuhan, pasarpasar, dan perguruan tinggi yang dapat mendorong penemuanpenemuan baru di bidang sains dan dapat diterapkan oleh kalangan industri dan pelaku pasar.
3. Infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan integrasi sosial-ekonomi rakyat satu daerah dengan daerah lainnya.
4. Pembangunan infrastruktur akan membuka isolasi fisik dan nonfisik di sejumlah wilayah. Dalam rangka politik integrasi bangsa di bidang sosial dan ekonomi tantangan bagi pemerintah ialah membangun infrastruktur yang dapat mengatasi isolasi fisik daerah di Indonesia awal abad 21 ini. Sebab isolasi fisik akan membawa dampak terhadap pembangunan sosial ekonomi pada wilayah-wilayah. ( Tarigan, 2004 ).

## **2.4 Perubahan Sosial Ekonomi Pada Pembangunan Infrastruktur**

Dalam proses pembangunan, aspek sosial ekonomi penduduk merupakan dasar yang sangat penting. Menurut Hagul (1985) pendekatan sosial ekonomi pembangunan terbatas atas tiga berdasarkan manusianya, yaitu:

1. The Trickle Down Theory, yaitu suatu pendekatan program percepatan pembangunan dan hasilnya dinikmati baik secara langsung atau tidak oleh masyarakat.

2. Basic Needs Approach, yaitu pendekatan yang meliputi upaya secara langsung menanggulangi masalah kebutuhan pokok misalnya: Gizi, kesehatan, kebersihan, pendidikan, dll.
3. Development From Within, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri serta membangun sesuai tujuan yang mereka kehendaki.

#### 2.4.1 Perubahan Sosial

Menurut Sumatmadja dalam Yulianti dan Purnomo (2003:37), perubahan sosial adalah “perubahan yang terjadi di masyarakat yang meliputi berbagai aspek kehidupan, sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat dan merupakan tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilan”. Perubahan sosial ini didukung oleh perkembangan kuantitas dan kualitas anggota masyarakat.

Dari pengertian di atas mengandung makna bahwa perubahan sosial adalah perubahan proses sosial yang terjadi pada masyarakat karena adanya inovasi, difusi, dan penemuan baru sehingga menyebabkan perkembangan kualitas dan kuantitas anggota masyarakat. Proses-proses perubahan sosial dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tidak adanya masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat akan mengalami perubahan baik cepat maupun lambat.
- b. Perubahan terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu, dan diikuti pada perubahan-perubahan lembaga sosial lainnya karena sifat kelembagaan tersebut yang independen maka sulit untuk mengisolasi perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu. Proses awal selanjutnya merupakan mata rantai.

Perubahan sosial yang cepat biasanya diikuti dengan organisasi yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri Disorganisasi ini akan diikuti oleh reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai baru. Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja, karena

bidang itu mempunyai kaitan yang timbal balik (Soekarto dalam Yulianti dan Poernomo, 2003:72).

Irawan dan Suparmoko, (2002), mengatakan bahwa penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Pertambahan penduduk akan mengakibatkan rangsangan untuk mengadakan investasi dan permintaan agregatif juga akan naik, begitu juga sebaliknya. Peningkatan jumlah penduduk juga mendorong adanya perluasan investasi karena adanya kebutuhan perumahan yang semakin besar dan juga kebutuhan yang bersifat umum seperti penyediaan sarana prasarana serta berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Alih fungsi lahan sawah ke penggunaan nonpertanian dapat berdampak terhadap turunnya produksi pertanian, serta akan berdampak pada dimensi yang lebih luas dimana berkaitan dengan aspek-aspek perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya masyarakat. Menurut Sudirja (2008) alih fungsi lahan pertanian bukan hanya sekedar memberi dampak negatif seperti mengurangi produksi beras, akan tetapi dapat pula membawa dampak positif terhadap ketersediaan lapangan kerja baru bagi sejumlah petani terutama buruh tani yang terkena oleh alih fungsi tersebut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penduduk yang pesat dapat mendorong terjadinya pengurasan sumberdaya, kekurangan tabungan, kerusakan lingkungan, kehancuran ekologis yang kemudian dapat memunculkan masalah sosial. Kedua adalah pandangan optimis yang berpendapat penduduk adalah aset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan promosi teknologi dan institusional sehingga dapat mendorong perbaikan kondisi sosial (Thomas dalam Kuncoro, 2003). mengatakan bahwa pertambahan penduduk yang terus terjadi dengan cepat menyebabkan beberapa masalah lingkungan yaitu: a) proses urbanisasi akan terjadi sehingga menyebabkan persoalan pencemaran di wilayah perkotaan, b) tekanan penduduk terhadap lahan

akan semakin tinggi, akibatnya terjadi sedimentasi dan erosi, dan c) tekanan penduduk terhadap kawasan hutan, menyebabkan menurunnya kualitas hutan yang menyebabkan erosi dan banjir pada musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

Alih fungsi lahan sawah tidak terlepas dari situasi ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan beberapa sector ekonomi tumbuh dengan cepat sehingga sektor tersebut membutuhkan lahan yang lebih luas. Lahan sawah yang terletak dekat dengan sumber ekonomi akan mengalami pergeseran penggunaan ke bentuk lain seperti pemukiman, industry manufaktur dan fasilitas infrastruktur. Hal ini terjadi karena land rent persatuan luas yang diperoleh dari aktivitas baru lebih tinggi daripada yang dihasilkan sawah (Prayudho, 2009). Menurut Irawan dan Suparmoko (2002) proses alih fungsi lahan pertanian pada tingkat mikro dapat dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan pihak lain. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain secara umum memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih fungsi lahan tersebut biasanya mencakup hamparan lahan yang cukup luas, terutama ditujukan untuk pembangunan kawasan perumahan.

#### 2.4.2 Perubahan Ekonomi

Suatau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di wilayah tersebut (Arsyad, 2010). Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi bernilai negatif berarti kegiatan perekonomian menunjukkan penurunan, sebaliknya jika tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut bernilai positif berarti kegiatan perekonomian mengalami peningkatan. Menurut Djyohadikusumo (1994), pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses pembangunan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan hasil pendapatan. Perbedaan pertumbuhan ekonomi akan membawa masing-masing daerah membentuk suatu pola pertumbuhan dimana dapat digolongkan dalam klasifikasi tertentu untuk mengetahui potensi relatif perekonomian suatu daerah yang dapat dilihat dengan menggunakan analisis.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan kegiatan yang penting yaitu untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Menurut Arsyad dalam Saputra (2015:34), dalam bukunya mengatakan bahwa :

“Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antar pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut”.

Setiap usaha pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus memperkirakan potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pembangunan telah memunculkan berbagai aktivitas ekonomi ikutan (sektor informal), terutama di wilayah perkotaan dan dampak dari perkembangan tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan kependudukan, permukiman, penataan lingkungan perkotaan dan lahan hijau (Kuncoro, 2003). Apabila permasalahan pembangunan di wilayah perkotaan tergambar dari dampak ikutan dari pembangunan itu sendiri seperti terjadinya pertumbuhan penduduk yang tinggi, penyediaan utilitas publik dan lapangan kerja, berkembangnya permukiman liar dan sektor informal yang tidak tertata, degradasi lahan tangkapan air hujan dan ekosistem lainnya, merangsang terjadinya lonjakan angka kriminalitas dan kemungkinan konflik berbasis ekonomi dan sosial.

Menurut Swapna dalam Arsyad (2010) para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumberdaya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat , namun karena keberadaan masyarakat amat beragam dan ditambah tingkat kemajuan ekonomi yang tiak mendukung, maka kebijakan tersebut belumlah berhasil memecahkan persoalan kelompok ekonomi tingkat bawah

Suatu hal yang mungkin sangat sulit untuk dipisahkan adalah, bahkan mungkin tidak bisa adalah hubungan antara pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu banyak ahli, terutama mereka yang mempunyai pendekatan pertumbuhan menganggap bahwa pembangunan itu sendiri sesungguhnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pula tumbuhnya pola hidup yang konsumtif. Kekayaan materi tidak saja untuk memenuhi kepentingan hidup tetapi juga menjadi simbol status sosial. Dengan semakin tingginya tingkat konsumtif manusia, makin banyak sumberdaya yang diperlukan untuk menopang pola hidup itu (Soemarwoto, 2001). Dilihat dari sisi peluang pertumbuhan ekonomi telah menciptakan banyaknya peluang usaha baru bagi masyarakat. namun permasalahan juga muncul akibat daya pikat ekonomi yang mendorong migrasi tenaga kerja dari luar yang tidak selalu dibekali dengan keahlian yang memadai.

Serr dalam Bahrum (1995) menyatakan bahwa bisa saja beberapa tipe pertumbuhan ekonomi untuk sementara waktu berhasil meningkatkan pendapatan perkapita akan tetapi ia dapat menyebabkan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan yang semakin lebar di masyarakat. Keberadaan pusat industri pada suatu wilayah perlu memperhatikan berkembangnya lapangan kerja lain (non industri) secara tak langsung karena jumlah tenaga kerja langsung biasanya jauh lebih kecil dari tenaga kerja tak langsung. Ciri tenaga kerja tak langsung itu adalah lapangan kerja sektor informal (Tood dalam Bahrum, 1995).

#### 2.4.3 Indikator Ekonomi Sosial

Ada indikator berdasarkan sejumlah data dan informasi statistik penting yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (2013) Republik Indonesia dibagi menjadi 10 bidang indikator utama dalam indikator sosial ekonomi. Secara rinci pembagian indikator sebagai berikut :

- 1) Keadaan Geografi meliputi : luas wilayah/provinsi dan jumlah daerah administrasi.

- 2) Penduduk dan Ketenagakerjaan : data penduduk meliputi : jumlah, kepadatan, umur, laju pertumbuhan, sedang data ketenagakerjaan meliputi: jumlah angkatan kerja, pengangguran, dan upah gaji.
- 3) balita, perkawinan, pendidikan, IPM, sumber air minum dan kemiskinan.
- 4) Pengeluaran Konsumsi meliputi : pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan.
- 5) Pertanian meliputi : luas panen dan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan.
- 6) Industri Manufaktur dan Konstruksi meliputi: indeks produksi industri manufaktur besar dan sedang, dan konstruksi.
- 7) Perdagangan Luar Negeri meliputi : data ekspor menurut negara tujuan, komoditi, migas dan non migas, impor menurut negara asal serta neraca perdagangan barang.
- 8) Pariwisata dan Transportasi meliputi : jumlah wisatawan menurut negara tempat tinggal, lama menginap dan tingkat kamar hotel, sedangkan data transportasi meliputi jumlah penumpang dan barang.
- 9) Keuangan dan harga-harga meliputi : APBN, moneter, valuta asing, Indeks Harga Konsumen, Inflasi, Indeks, Harga Perdagangan Besar, Nilai Tukar Petani, Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsume.
- 10) Pendapatan Nasional dan Regional meliputi : Produk Domestik Bruto, Produk Domestik Regional Bruto, dan pendapatan nasional perkapita.

Dalam menganalisis perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur peneliti menggunakan indikator penduduk dan ketenagakerjaan pada poin 2 diatas. Hal tersebut dikarenakan dalam menganalisis perubahan sosial ekonomi masyarakat dapat diukur melalui indikator kependudukan dan ketenagakerjaan. Selain itu indikator tersebut relevan untuk menunjukkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam lingkup wilayah kabupaten.

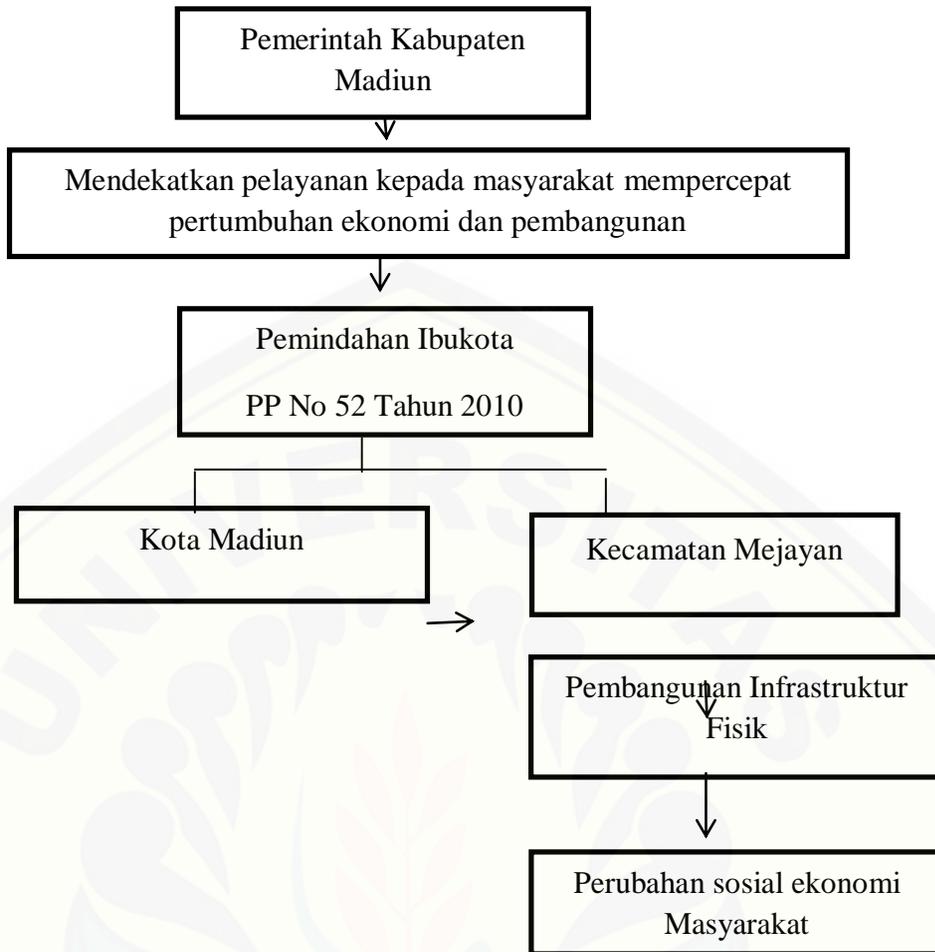
## 2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian sebelumnya

Judul	Variabel	Jenis penelitian	Hasil Penelitian
Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU ) Paiton Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Binor , Rizki Febri Eka ( 2014 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Pendapatan</li> <li>• Interaksi Sosial</li> </ul>	Deskriptif dengan teknik survey	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terjadi perubahan pada masyarakat Desa Binor yang bekerja mengalami peningkatan sebanyak 1.020</li> <li>b. Jenis pekerjaan sebagai buruh tani mengalami penurunan sebanyak 49% karena munculnya lapangan usaha baru</li> <li>c. Masyarakat Desa Binor umumnya mencapai pendidikan minimal SMA/SMK</li> <li>d. Rata Rata Pendapatan Masyarakat bisa mencapai Rp 2.000.000,00</li> <li>e. Memudarnya rasa tolong menolong, pola hidup mulai konsumtif dan munculnya gaya hidup hedonism.</li> </ol>
Dampak Kebijakan Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu, Ananda Tri Dharma Yanti (2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobillitas sosial</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Kelancaran Arus Transportas</li> <li>• Tingkat Pendapatani</li> </ul>	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Degan adanya jembatan suramadu mobilitas masyarakat menjadi semakin luas mengingat jembatan langsung menghubungakn dengan kota surabaya.</li> <li>2. Munculnya dua sekolah negeri baru yaitu SMK dan SMP</li> <li>3. Arus transportasi semakin lancar sehingga mempermudah masyarakat dalam mendistribusikan barang dan jasa ke puau jawa atau sebaliknya.</li> <li>4. Bagi masyarakat yang aktif dan kreatif terjadi perubahan pendapatan yang signifikan, sedangkat</li> </ol>

			bagi masyarakat yang kurang produktif mengalami penurunan pendapatan.
Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar Ke Kecamatan Kanigoro, Pemerintah Kabupaten Blitar ( 2016 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesempatan kerja</li> <li>• Kesempatan Berusaha</li> <li>• Akses Permodalan</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Kesehatan</li> <li>• Keamanan</li> <li>• Budaya</li> <li>• Lingkungan</li> </ul>	Deskriptif Kuantitatif	<p>Di Bidang ekonomi</p> <p>1) Dampak positif perpindahan ibukota Kabupaten Blitar Ke Kanigoro adalah, yaitu terciptanya lapangan kerja, kesempatan kerja, peluang investasi dan tersedianya sumber pembiayaan investasi.</p> <p>2) Dampak negatifnya adalah: i. Produktivitas lahan pertanian menyusut karena banyak pengalihan lahan sehingga menimbulkan pengangguran baru akibat hilangnya pekerjaan di sektor pertanian. ii. Karena pendidikan rendah, ada kekhawatiran masyarakat bahwa kesempatan kerja baru yang ditimbulkan perpindahan ibu kota Kab. Blitar akan diambil tenaga kerja dari luar iii. Kesempatan berinvestasi akan diambil pemilik modal kuat dari luar</p> <p>Di bidang sosial,</p> <p>1) Dampak positif, berkembangnya sarana pendidikan, sarana kesehatan dan fasilitas publik akan secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan kemajuan kehidupan sosial masyarakat di sekitar Kota Kanigoro.</p> <p>2) Dampak negatifnya adalah tumbuhnya pusat-pusat keramaian dan sarana hiburan lainnya. Dan, sudah dapat dipastikan di Kota Kanigoro ke depan akan semakin padat dan bising, kerawanan lalu lintas, kerawanan sosial dan keamanan bagi masyarakat di Kota Kanigoro dan sekitarnya.</p>

2.6 Kerangka Berfikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008:2). Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai maksud yang diinginkan. Metode menyangkut masalah cara-kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori. Sedangkan metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian (Usman dan Akbar, 2003:42).

Pada metode penelitian terdapat teknik-teknik yang bisa digunakan bagi peneliti untuk mengkaji proses penelitiannya tersebut, meliputi;

- a. Pendekatan Penelitian;
- b. Tempat dan Waktu Penelitian;
- c. Situasi Sosial;
- d. Desain Penelitian;
- e. Teknik dan Alat Perolehan Data;
- f. Teknik Penyajian Data

#### **6.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian adalah langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Metodologi dipengaruhi atau berdasarkan perspektif teoritis yang kita gunakan untuk melakukan penelitian sementara perspektif teoritis itu sendiri adalah suatu kerangka penjelasan atau interpretasi yang memungkinkan peneliti menghubungkan data yang rumit dengan

peristiwa dan situasi lain. Dalam penelitian kancang dikenal dengan dua macam penelitian. Penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif melibatkan pada perhitungan atau angka atau kuantitas. Sedangkan kualitatif tidak mengadakan perhitungan karena lebih menekankan pada kealamiah sumber data.

Untuk mengetahui perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur Ibukota Kabupaten Madiun di kecamatan Mejayan penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moleong: 1988 : 2) menerangkan bahwa “Penelitian Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati”. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sedangkan penelitian deskripsi bermaksud membuat pemerian (penyandaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu ( Usman dan Akbar,2009:4).

Berdasarkan penjelasan tersebut, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat mengetahui dan menggambarkan mengenai perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur Ibukota Kabupaten Madiun di kecamatan Mejayan.

## **6.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Untuk menggambarkan perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur Ibukota Kabupaten Madiun di kecamatan Mejayan peneliti memilih Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebagai tempat penelitian. Kecamatan Mejayan dipilih sebagai tempat penelitian dengan alasan sebagai berikut:

1. Masyarakat kecamatan Mejayan merupakan penerima langsung pembangunan infrastruktur di kecamatan Meayan.

2. Belum adanya penelitian terdahulu terkait dengan perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur Ibukota Kabupaten Madiun di kecamatan Mejayan

3. Kecamatan Mejayan terletak tidak jauh dari tempat tinggal peneliti, sehingga kemudahan akses merupakan salah satu alasan peneliti memilih kecamatan Mejayan.

Waktu penelitian adalah Juni 2017 sampai September 2017.

## **5.5 Situasi Sosial**

### **5.5.2 Tempat**

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Kecamatan Mejayan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Madiun yang memiliki luas 5.522 ha. Kantor camat terletak pada koordinat 7,545 Lintang selatan dan 111,6549 Bujur timur dengan ketinggian sekitar 75 meter diatas permukaan air laut. Wilayah ini terbagi habis menjadi 11 desa dan 3 kelurahan dimana Desa Darmorejo menjadi desa dengan wilayah terluas dan Desa Kuncen menjadi desa dengan wilayah terkecil.

Wilayah Kecamatan Mejayan berbatasan dengan Kecamatan Pilangkenceng dan Saradan di sebelah Utara. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Saradan dan Gemarang, sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gemarang dan Kare. Kecamatan Wonoasri berbatasan dengan Kecamatan Mejayan di sebelah barat.

### **5.5.3 Pelaku**

Pelaku dari perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur Ibukota Kabupaten Madiun di kecamatan Mejayan adalah Pemerintah Kecamatan, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat kecamatan Mejayan.

## **5.6 Desain Penelitian atau Rancangan Penelitian**

Menurut Pedoman Karya Tulis Ilmiah Univeristas Jember (2016:52), desain penelitian menetapkan peneliti sebagai human instrument, berfungsi

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya (Silalahi, 2009). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif, bentuk desain penelitian dimungkinkan bervariasi karena sesuai dengan bentuk alami penelitian kualitatif itu sendiri yang mempunyai sifat emergent dimana fenomena muncul sesuai dengan prinsip alami yaitu fenomena apa adanya sesuai dengan yang dijumpai oleh seorang peneliti dalam proses penelitian dilapangan.

#### 6.4.1 Fokus Penelitian

Moleong (2007:94-95), penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian.

Fokus dalam penelitian ini adalah: Mendeskripsikan perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur Ibukota Kabupaten Madiun di kecamatan Mejayan

#### 6.4.2 Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sample. Purposive sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:85).

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mencoba untuk mengetahui perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur Ibukota Kabupaten Madiun di kecamatan Mejayan maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat ialah pimpinan Kecamatan Mejayan. Dari

informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan-informan berikutnya, dengan catatan informan-informan tersebut merupakan pihak-pihak yang terkait perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur Ibukota Kabupaten Madiun di kecamatan Mejayan sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapatkan dari informan pertama.

Penulis memilih informan sesuai dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah penulis tetapkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut;

1. Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Mejayan, dengan kriteria;
  - a. Tingkat Pendidikan Minimal SD
  - b. Umur  $\geq 20$  tahun
  - c. Pekerjaan sebagai petani, pedagang, wiraswasta dan sebagainya.
2. Tokoh masyarakat disekitar infrastruktur terbangun.
3. Pengunjung sarana terbangun.
4. Bersedia diminta keterangan dan informasi.
5. Merasakan perubahan dari pembangunan infrastruktur yang dibangun di kecamatan Mejayan

Berdasarkan kriteria informan diatas maka penulis memilih informan sebagai berikut ;

1. Ir. Gunawi selaku kepala sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Madiun.;
2. Bapak Iwan Ardy selaku sekretaris kecamatan Mejayan.;
3. Bapak Bobby Saktia Putra selaku staf Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Madiun.;
4. Bapak Rudi, S. Ab, selaku staf Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah pada kantor Bappeda Kabupaten Madiun;
5. Ibu Sri Mulyani selaku Staff Bidang Perhubungan pada kantor Bappeda Kabupaten Madiun.;
6. Ibu suryati, 46 Tahun penjual nasi atau warung di desa Krajan.

7. Bapak Agus Bintoro, 41 pedagang maianan di desa Pandeyan.
8. Bapak Edi, 37 tahun penyedia rental maianan anak dari desa Mejayan.
9. Ibu Angry Novita D, 25 Tahun usaha angkringan di desa Bangunsari.
10. Bapak Sugeng, 45 Tahun warga desa Mejayan.

#### 6.4.3 Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua macam data, yaitu;

- a. Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22). Data diperoleh dari responden langsung yang sudah ditentukan peneliti.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lainlain (Arikunto, 2010:22). Dalam hal ini data diperoleh dari Kantor Kecamatan Mejayan, Kantor Kepala Desa di kecamatan Mejayan, Badan Pusat Statistik, dan kantor instansi terkait dan publikasi terkait dengan penelitian seperti Statistik Kecamatan Mejayan, RTRW Kabupaten Madiun, dan lain-lain.

#### 6.5. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

1. Observasi, Observasi menurut Kusuma (1987:25) adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan. Sehingga peneliti dapat menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, tugas/kegiatan, alamat, nomor telepon dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.

2. Wawancara, yaitu percakapan langsung dengan informan untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti yang dilakukan dengan sistematis dan terorganisir. Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (in-depth interview).

3. Studi Pustaka, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dokumentasi Dokumen menurut Sugiyono, (2009:240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai segala sesuatu tentang topic penelitian. Seperti dalam penelitian ini dokumen yang bisa dilampirkan berupa lampiran peraturan dana desa, anggaran dana dan segala macam bentuk dokumen yang berkaitan. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

## **6.6 Teknik Uji Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan (Moleong, 2007:324). Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Kriteria tersebut yang digunakan yaitu Kredibilitas atau derajat kepercayaan. Pemilihan kriteria tersebut berdasarkan pertimbangan peneliti terkait rencana yang akan dilakukan. Teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut sebagai berikut;

1. Ketekunan Pengamatan

Menurut Moleong (2007:329-330), ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

2. Triangulasi

Triangulasi menurut Moleong (2014:332) teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzin dalam Moleong (2012:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan Moleong (2014:332) berikut ini;

- a. mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. mengecek dengan berbagai sumber data; dan
- c. memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan..

### **6.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data**

Terkait dengan analisis data dalam penelitian kualitatif, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis data Miles dan Huberman yaitu model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip Idrus (2009:148), ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-

menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

#### 1. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Menurut Idrus (2009:148), proses pengumpulan data harus melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa. Data penelitian kualitatif bukan hanya sekedar terkait dengan kata-kata, tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan data dalam penelitian kualitatif adalah segala sesuatu yang diperoleh dari yang dilihat, didengar, dan diamati. Dengan demikian, data berupa catatan lapangan sebagai hasil amatan, deksripsi wawancara, catatan harian/pribadi, foto, pengalaman pribadi, jurnal, cerita sejarah, dll.

Dalam tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data seperti dokumen RTRW Kabupaten Madiun, statistik kecamatan Mejiyan dan lain sebagainya. Selain itu melakukan tahap wawancara awal untuk memperkuat masalah yang terjadi, dan melakukan pengumpulan sumber-sumber berita dari jurnal yang terkait dengan perubahan sosial ekonomi masyarakat pada pembangunan infrastruktur Ibukota Kabupaten Madiun di kecamatan Mejiyan untuk memastikan bahwa sesuatu tersebut benar-benar terjadi.

#### 2. Tahap Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles & Huberman, 2007:16). Reduksi data terjadi secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses

verifikasi. Bagi peneliti kualitatif, kegiatan reduksi data menjadi sangat penting karena yang bersangkutan dapat mulai memilah dan memilih data mana dan data dari siapa yang harus lebih dipertajam.

Terkait dengan reduksi data, peneliti disini melakukan pemusatan perhatian pada sesuatu yang berhubungan dengan topik yang peneliti teliti. Jadi dari hasil perolehan dokumen, dan wawancara serta pengamatan langsung dilapangan, peneliti melakukan pemilihan dan memusatkan pada hal yang berkaitan dengan dampak pembangunan infrastruktur.

### 3. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang menurut Miles & Huberman dalam Idrus (2009:151) sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data adalah aktivitas-aktivitas yang terkait langsung dengan proses analisis data model interaktif. Dengan begitu, kedua proses ini pun berlangsung selama proses penelitian berlangsung dan belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun sehingga jangan terburu-buru untuk menghentikan kegiatan display data ini sebelum yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun mendapat dukungan dari masyarakat kabupaten sehingga lebih mudah di implementasikan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur terkait dengan pemindahan ibukota sudah berjalan dengan lancar. Pembangunan infrastruktur di kecamatan Mejayan membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat diantaranya :

1. Perubahan Ekonomi
  - a. Tersedianya kesempatan kerja, adanya kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan memberikan perubahan yang positif yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat wilayah Mejayan. Dari jumlah warung, kios dan toko masing periode 2010-2015, jumlah warung berkembang 63,5%, toko 76,8 %, dan kios sebesar 78,8%. seiring berkembangnya jumlah warung , toko, dan kios turut berkembang pula jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.
  - b. Peningkatan pendapatan perkapita, semakin banyak nya jenis usaha yang dijalankan masyarakat Mejayan membawa perubahan terhadap jumlah pendapatan perkapita masyarakat. Dari angka perkembangan jumlah pendapatan perkapita dapat diketahui bahwa dalam periode tahun 2010 sampai tahun 2014 terjadi peningkatan pendapatan perkapita yang sangat tinggi yaitu sebesar 72,19%. Sedangkan pada tahun 2014 hingga 2016 peningkatan pendapatan perkapita sebesar 4,64%.
2. Perubahan Sosial
  - a. Alih Fungsi Lahan, pembangunan infrastruktur pendukung ibukota Kabupaten Madiun di kecamatan Mejayan membawa pengaruh terhadap perubahan alih fungsi lahan. Peralihan fungsi lahan sebagai lahan terbangun periode tahun 2006 hingga tahun 2014 yaitu sebesar 7% dari desa disekitar wilayah terbangnya infrastruktur. Dengan semakin ramainya wilayah

kecamatan Mejayan serta banyaknya fasilitas yang dibangun membuat beberapa perubahan alih fungsi lahan masyarakat menjadi bangunan yang membawa perubahan terhadap harga jual tanah yang semakin tinggi.

- b. Kebiasaan buruk masyarakat, Pembangunan infrastruktur juga membawa perubahan negatif seperti pola hidup konsumtif dan hedonisme serta mudarnya interaksi sosial karena masyarakat sibuk dengan usahanya sendiri.
- c. Keamanan , semakin ramainya wilayah kecamatan Mejayan karena sudah menjadi sarana pusat rekreasi bagi masyarakat Mejayan maupun luar kecamatan Mejayan membawa perubahan terhadap keamanan di wilayah kecamatan Mejayan. Sampai dengan tahun 2016 perubahan terhadap keamanan kecamatan Mejayan cenderung turun angka kriminalitasnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas maka dapat dikemukakan lebih lanjut saran untuk Kecamatan Mejayan kedepannya sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Madiun :

1. Mempercepat proses pembangunan Perkotaan Mejayan sebagai ibukota Kabupaten Madiun dengan segera memindahkan seluruh aktivitas pemerintah yang masih ada di wilayah Kota Madiun, dengan segera memindahkan sehingga Perkotaan Mejayan dapat segera berfungsi secara maksimal sebagai pusat pemerintahan Kabupaten. Sehingga apabila mampu dikembangkan lebih jauh akan menjadi magnet yang menarik aktivitas sekitarnya.
2. Diharapkan pada masyarakat yang berada di sekitar pembangunan infrastruktur terkait dengan pemindahan ibukota ini bisa memanfaatkan pemindahan serta sosialisasi masyarakat setempat agar dapat memanfaatkan dengan berwirausaha sehingga munculnya jenis usaha baru dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus menjaga perilaku sosialnya, hal tersebut diakarenakana seiring berkembangnya kecamatan Mejayan sebagai wilayah perkotaan akan mengubah pola perilaku masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Adisasmita, Sakti Adi. 2011. *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alkadri. et all. 1999. *Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Tiga Pilar
- Anderson, James E. 1984. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Wiston.
- Arikunto, S. 2010 *Prsedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : BPSTIE YKPN.
- Badan Pusat Stastistik. 2013. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*. Diakses pada tanggal 12 Maret 2017 dari <http://www.bps.go.id/>
- Bintarto, R. 1986. *Urbanisasi dan Pemasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Daldjoeni. 1992. *Geografi Baru*. Bandung : PT. Alumnipress.
- Dhoni, Siti Khusnul. 2012. *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan*. Malang. Universitas Brawijaya.
- Djoyohadikusumo, Sumitro. 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LPES
- Dun, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye. Thomas R, 1995. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall Inc. New Jersey
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata guna tanah dalam perencanaan pedesaan perkotaan dan wilayah*. Bandung : Institut Teknologi Bandung
- Khairuddin, 2000. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty
- Moloeng, Lexy J. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja
- Moloeng, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Rosdakarya
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : Pustaka LP3ES
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses, Kebijakan- Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi-Risk Management*

- dalam Kebijakan Publik-Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan.* Jakarta: PT.Media Elex Komputindo.
- O’Sullivan, Arthur. 2012. *Urban Economics*. New York : McGraw-Hill
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Ratnawati, Tri. 2006. *Potret pemerintah lokal di Indonesia dimasa perubahan: Otonomi Daerah Tahun 2000-2005*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sarundajang, Sinyo Harry. 1997. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju
- Siagian, Sondang P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekarwati. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soemarwoto, O. 2001. *Ekologi, Lingkungan dan Pembangunan*. Jakarta: Djembatan
- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: alabeta
- Sukirno, Sadono.1999. *Makroekonomi Modern. Perkembangan pemikiran dari klasik hingga keynesian baru*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sumardi, Mulyanto. 1982. *Sumber pendapatan, kebutuhan pokok dan perilaku menyimpang*. Jakarta: Rajawali
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan. Daerah*. Yogyakarta : Andi
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Tirtarahardja, Umar. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Usman, dan Akbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Yunus, Hadi Sabari. 2005. *Manajemen Kota Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

### Skripsi

- Maghfiroh, Vika Amilati. 2015. *Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Daerah dalam Mewujudkan Sustainable Development (Studi di Kawasan Industri Maspion Unit V, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)*. Malang. Universitas Brawijaya
- Rimba. Ikhe Prandini. 2015. *Perubahan Morfologi Kota di Kecaatan Mejayan Kabupaten Madiun Tahun 2006-2014*. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya
- Triawan. 2016. *Analisis Perkembangan dan daya Dukung Wilayah Untuk Evaluasi Penentuan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun Jawa Timur 2005-2014*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Wijayanti, Puput. 2011. *Pengaruh Ketersediaan Tenaga kerja, Infrastruktur, Pendapatan Perkapita dan Suku Bunga terhadap Investasi Industri Kota Semarang*. Semarang : Universitas Diponegoro

### Jurnal

- Zunaidi, Muhammad. 2013. Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Pasca Relokasi dan Pembangunan Pasar Modern. *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3, No.1

### Lembaga

- CV. Kumara Associaties. 2010. *Laporan Akhir Feasibility Study Pembangunan Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2010*. Madiun : Pemerintah Kabupaten Madiun
- Badan Pusat Stastistik. 2013. *Statistika Daerah Kabupaten Madiun*. Diakses pada tanggal 23 februari 2017 dari <http://madiunkota.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. 2002. *Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2006-2016. *Mejayan Dalam Angka*. Madiun : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Kecamatan Mejayan*. Badan Pusat Statistik. Madiun

### Undang- Undang :

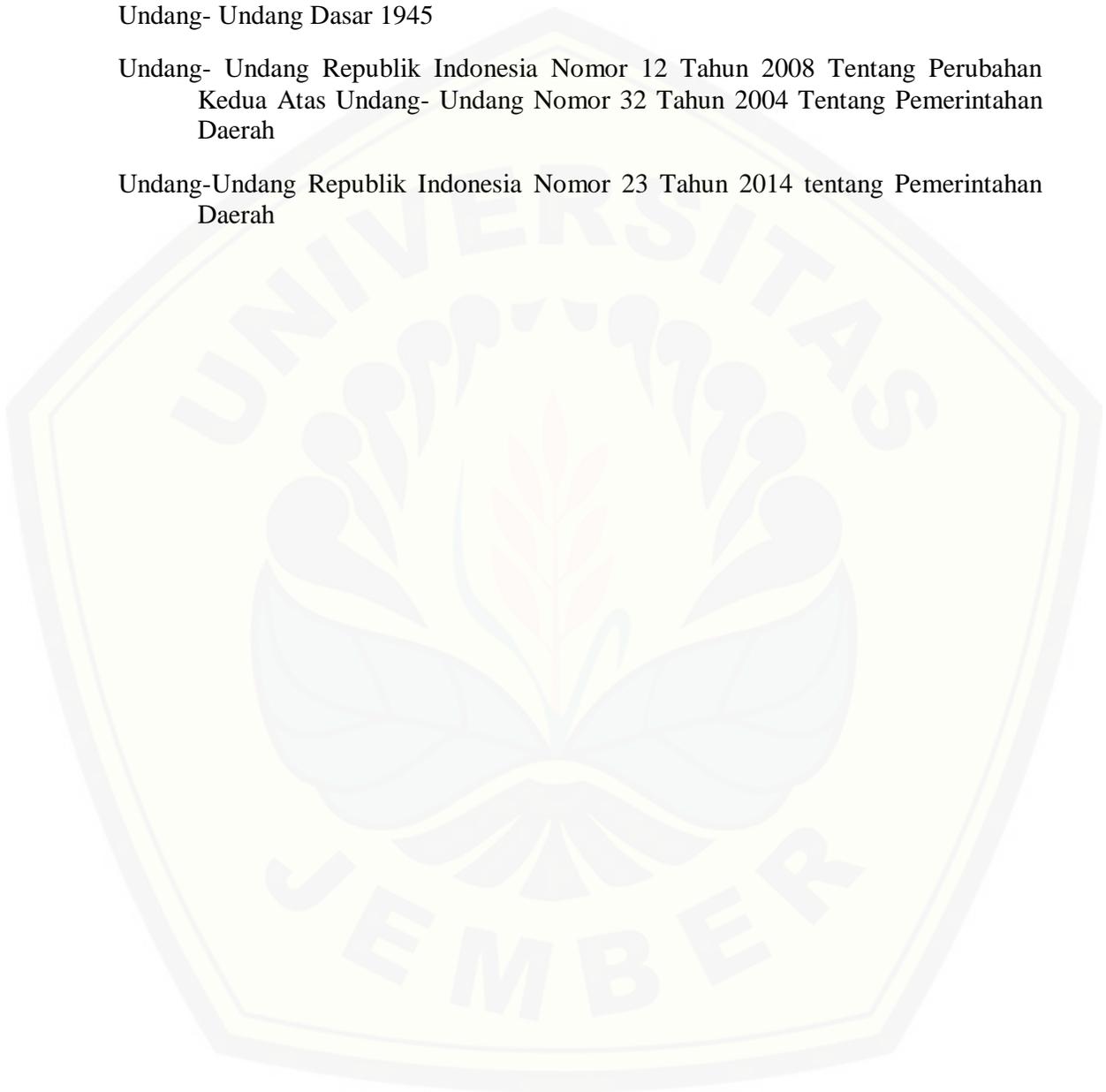
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Pemindehan Ibu Kota Kabupaten Madiun Dari wilayah Kota Madiun ke

Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Jawa Timur Kabupaten Madiun  
Provinsi Jawa Timur

Undang- Undang Dasar 1945

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan  
Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah



**LAMPIRAN**



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 52 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH**  
**KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, tempat kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun berada di Kota Madiun;
- b. bahwa dalam perkembangannya Kota Madiun yang semula merupakan wilayah tempat kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, telah menjadi daerah kota besar yang otonom dan terpisah dari Kabupaten Madiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, sehingga Ibu Kota Kabupaten Madiun perlu dipindahkan dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kabupaten Madiun;
- c. bahwa pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dimaksudkan pula untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun;
- d. bahwa wilayah Kecamatan Mejayan di Kabupaten Madiun dinilai layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Madiun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 582);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Pemerintah ini, Ibu Kota Kabupaten Madiun dipindahkan dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.

**Pasal 2**

- (1) Wilayah Kecamatan Mejayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai batas-batas sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pilangkenceng dan Kecamatan Saradan;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Saradan dan Kecamatan Gemarang;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gemarang dan Kecamatan Kare; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Wonoasri.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Mejayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Peta Wilayah Kecamatan Mejayan Ibu Kota Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 3**

Pendanaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.

**Pasal 4**

Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sepanjang yang menyangkut instansi vertikal atau pemerintah provinsi, menjadi tanggung jawab menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau gubernur yang membawahi instansi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Madiun dipindahkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Ibu Kota Kabupaten Madiun.

**Pasal 6**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Juni 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 73

**PENJELASAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 52 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH**  
**KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, tempat kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun berada di Kota Madiun. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, Kota Madiun telah menjadi daerah kota besar yang otonom dan terpisah dari Kabupaten Madiun, sehingga Ibu Kota Kabupaten Madiun perlu dipindahkan dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kabupaten Madiun.

Selain hal tersebut di atas, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun maka lokasi Ibu Kota Kabupaten Madiun yang saat ini masih berada di wilayah Kota Madiun perlu dipindahkan ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Wilayah Kecamatan Mejayan terdiri dari Desa Kaliabu, Desa Klecorejo, Desa Blabakan, Desa Wonorejo, Desa Kebonagung, Desa Darmorejo, Desa Kaligunting, Desa Sidodadi, Desa Kuncen, Desa Mejayan, Desa Ngampel, Kelurahan Bangunsari, Kelurahan Krajan, dan Kelurahan Pandean. Pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan terletak pada koordinat 07° 32' 28,71" LS (Lintang Selatan) dan 111° 39' 08,40" BT (Bujur Timur).

Pada saat ini, pembangunan di Kabupaten Madiun tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik maupun nonfisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya, dan perkembangan jumlah penduduk. Dengan berpindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan, memungkinkan pembangunan pertumbuhan pelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan, dan kegiatan lainnya di seluruh wilayah yang diimbangi dengan penataan ruang wilayah kabupaten, khususnya bagi penyelenggaraan pusat pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Madiun.

Hasil peninjauan lapangan secara keseluruhan Kecamatan Mejayan dinilai layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Madiun, khususnya dari aspek dukungan lahan, rentang kendali pemerintahan, dukungan masyarakat, pelayanan masyarakat, aset, dan peluang pengembangan selanjutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemindahan pusat pemerintahan dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun telah diusulkan oleh Bupati Madiun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun dengan surat Nomor 135.7/335/402.011/2009 tanggal 6 November 2009 perihal permohonan persetujuan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun sesuai dengan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Persetujuan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan Pemberian Nama Caruban sebagai Nama Ibu Kota Kabupaten Madiun, diteruskan dengan surat Bupati Madiun Nomor 135.7/375/402.011/2009 tanggal 15 Desember 2009 kepada Gubernur Jawa Timur perihal usul pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, serta surat Gubernur Jawa Timur Nomor 135/844/011/2010 tanggal 18 Januari 2010 kepada Menteri Dalam Negeri perihal usul pemindahan Ibu

Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5134

DOKUMENTASI

